BAB II
KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PENELITIAN

A. Kajian Teori

1. Grand, Middle, dan Applied Theory

Dalam penelitian ilmiah, khususnya dalam bidang sosial-ekonomi dan manajemen, penggunaan kerangka teori yang berlapis menjadi penting untuk memastikan bahwa penelitian memiliki landasan konseptual yang kuat sekaligus relevan secara empiris. Kerangka tersebut umumnya terdiri dari *grand theory, middle theory,* dan *applied theory.*

Grand theory merupakan teori yang bersifat abstrak, luas, dan fundamental, yang digunakan untuk menjelaskan fenomena sosial secara umum dan menyeluruh. *Grand theory* biasanya tidak langsung operasional, tetapi memberikan kerangka konseptual utama yang menjadi dasar pemikiran penelitian. Menurut Robert K. Merton, *grand theory* berupaya membangun sistem konseptual yang komprehensif untuk menjelaskan struktur dan dinamika sosial secara makro. Teori ini seringkali bersifat filosofis dan normatif, serta tidak selalu mudah diuji secara empiris.

Dalam konteks ilmu sosial, *grand theory* berfungsi untuk:

a. memberikan landasan ontologis dan epistemologis,
b. menjelaskan hubungan umum antar konsep besar, dan
c. menjadi dasar dalam pengembangan teori yang lebih spesifik.

Dengan demikian, *grand theory* menjadi pijakan utama dalam memahami fenomena seperti pembangunan, kesejahteraan, dan perilaku ekonomi secara luas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Middle theory merupakan teori yang berada di antara grand theory dan realitas empiris. Teori ini lebih spesifik, terfokus, dan dapat diuji secara empiris dibandingkan *grand theory*. Masih menurut Robert K. Merton (1968), *middle-range theory* dirancang untuk menjelaskan fenomena sosial tertentu melalui proposisi yang dapat diuji, sehingga menjembatani kesenjangan antara teori abstrak dan data empiris. Karakteristik utama *middle theory* adalah:

a. lebih operasional dan terukur,
b. memiliki konstruk yang jelas,

c. dapat diuji melalui metode kuantitatif maupun kualitatif,
d. relevan dengan konteks penelitian tertentu.

Middle theory berfungsi sebagai jembatan konseptual, yang menerjemahkan ide-ide besar dari grand theory menjadi model yang lebih aplikatif dalam penelitian.

Applied theory merupakan teori yang bersifat praktis dan operasional, yang digunakan secara langsung dalam proses penelitian, khususnya dalam:

a. penyusunan model penelitian,
b. pengukuran variabel,
c. serta analisis data.

Applied theory sering kali berkaitan dengan pendekatan metodologis atau model analisis tertentu. Dalam hal ini, teori tidak hanya menjelaskan fenomena, tetapi juga memberikan alat untuk menguji hubungan antar variabel secara empiris.

Menurut Rex B. Kline (2015), dalam konteks penelitian kuantitatif, penggunaan pendekatan seperti *Structural Equation Modeling (*SEM*)* merupakan bentuk penerapan teori pada level operasional untuk menguji hubungan kausal antar konstruk laten secara simultan. Dengan demikian, *applied theory* berfungsi untuk:

a. menghubungkan konsep dengan instrumen penelitian,
b. memungkinkan pengujian hipotesis,
c. serta menghasilkan temuan empiris yang terukur.

Integrasi ketiga tiga jenis teori tersebut menghasilkan kerangka penelitian yang kuat secara teoritis, relevan secara kontekstual, dan dan teruji secara empiris. Oleh karena itu, penggunaan ketiga lapisan teori ini sangat penting dalam penelitian berbasis model seperti SEM, karena memastikan bahwa hubungan antar variabel tidak hanya bersifat statistik, tetapi juga memiliki dasar teoritis yang kokoh.

Penelitian ini bertumpu pada tiga tingkatan teori utama, yaitu *grand theory, middle-range theory,* dan *applied theory* yang saling melengkapi dalam membentuk kerangka konseptual pembangunan model ekosistem kewirausahaan sosial berbasis HIPMI untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). *Grand Theory* merupakan teori yang menyediakan landasan konseptual yang luas dan abstrak. *Middle-Range Theory* merupakan teori yang berperan menjembatani teori

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

besar dengan praktik konkret dalam penelitian. *Applied Theory* merupakan teori atau model praktis yang digunakan untuk implementasi dan intervensi kebijakan.

Tabel 2.1
Teori Penelitian

Tingkatan Teori	Nama Teori	Kontribusi dalam Model Penelitian
Grand Theory	*Institutional Theory* (North)	Landasan aturan main formal (HIPMI) dan informal (Maqasid).
	Human Capital Theory (Becker)	Landasan karakteristik individu sebagai aset utama.
Middle Theory	*Ecosystem Model* (Isenberg)	Kerangka kerja pembentukan lingkungan usaha (Ekosistem).
	Triple Helix Model (Etzkowitz & Leydesdorff)	Kerangka kerja sinergi aktor eksternal dan institusi.
Applied Theory	*Social Entrepreneurship* (Mair & Marti)	Operasionalisasi tindakan penciptaan nilai sosial.
	Maqasid Systems Approach (Auda)	Parameter nilai etika dan spiritualitas Islam.
	SDGs Framework	Parameter keberhasilan dampak global (*Output*).

Model penelitian ini dibangun di atas fondasi *Institutional Theory* dari North untuk melihat aturan main organisasi. Kemudian diturunkan ke *Middle Theory* menggunakan Model Ekosistem Isenberg untuk memetakan sistem pendukungnya. Terakhir, mengaplikasikan Sistem Maqasid Jasser Auda untuk memastikan bahwa seluruh ekosistem tersebut bermuara pada kemaslahatan yang selaras dengan SDGs.

Institutional Theory (Teori Institusional) yang dikembangkan oleh Douglass C. North (1990). Dalam diskursus ekonomi institusional baru (*New Institutional Economics*), Douglass C. North (1990) mendefinisikan institusi sebagai "aturan main dalam masyarakat" (*the rules of the game in a society*). Institusi adalah batasan-batasan yang diciptakan secara sengaja oleh manusia untuk membentuk interaksi politik, sosial, dan ekonomi. Inti dari pemikiran North adalah bahwa institusi berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian (*uncertainty*) dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

menyediakan struktur yang stabil dalam kehidupan sehari-hari, sehingga biaya transaksi (*transaction costs*) dapat ditekan dan efisiensi ekonomi dapat tercapai.

North membagi institusi ke dalam dua kategori utama yang saling berinteraksi:

a. Kendala Formal (*Formal Constraints*): Meliputi peraturan tertulis, hukum, konstitusi, dan kontrak yang dibuat oleh otoritas resmi. Dalam model *Islamic Social Entrepreneurship Ecosystem Model* (ISEEM), ini direpresentasikan oleh Peran Institusi HIPMI dan regulasi dari Dukungan Eksternal.
b. Kendala Informal (*Informal Constraints*): Meliputi norma, adat istiadat, kode etik, dan tradisi yang berakar pada kebudayaan. Dalam penelitian ini, Maqasid Syariah dipandang sebagai institusi informal yang sangat kuat, karena ia menyediakan kerangka nilai dan etika bagi pengusaha Muslim yang seringkali lebih dipatuhi daripada aturan hukum formal semata.

Pembedaan krusial dalam teori North adalah antara institusi dan organisasi. Jika institusi adalah aturan mainnya, maka organisasi (seperti HIPMI) adalah pemainnya (*the players*). Organisasi dibentuk oleh sekelompok individu yang terikat oleh tujuan bersama untuk mencapai misi tertentu di bawah bingkai aturan (institusi) yang ada. Interaksi antara organisasi dan institusi menciptakan perubahan institusional; organisasi beradaptasi dengan aturan yang ada, namun mereka juga berupaya mengubah aturan tersebut agar lebih menguntungkan bagi aktivitas mereka, seperti melalui advokasi kebijakan (North, 1990; Scott, 2014). Keberhasilan model yang dibangun dalam mencapai SDGs bergantung pada sejauh mana organisasi HIPMI mampu menginternalisasi institusi informal (Maqasid Syariah) ke dalam operasionalisasi organisasi mereka.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Argumen sentral North adalah bahwa institusi sangat menentukan biaya transaksi dan biaya produksi, yang pada gilirannya menentukan kinerja ekonomi suatu bangsa (North, 1990). Dalam konteks kewirausahaan, institusi yang efektif memberikan insentif bagi individu untuk terlibat dalam aktivitas produktif. Sebaliknya, institusi yang lemah atau korup akan mendorong aktivitas distributif

yang tidak produktif atau menghambat inovasi karena tingginya biaya transaksi dan ketidakpastian hukum.

North berargumen bahwa perubahan institusional terjadi secara inkremental dan dipengaruhi oleh persepsi para aktor tentang insentif yang ada. Dalam konteks Ekosistem Kewirausahaan Sosial, jika "aturan main" yang ada memberikan insentif lebih besar bagi kegiatan sosial (seperti kemudahan akses modal atau rekognisi sosial), maka para pengusaha akan cenderung bergerak menuju pencapaian SDGs. Sebaliknya, jika institusi gagal menyediakan insentif, maka potensi modal manusia (*Human Capital*) akan terbuang pada aktivitas yang tidak produktif.

North (1990) menegaskan bahwa institusi bukan sekadar organisasi, melainkan kerangka kerja insentif yang menentukan arah perkembangan ekonomi. Dalam model yang ditawarkan, integrasi Maqasid Syariah berfungsi sebagai institusi informal yang memperkuat efektivitas peran organisasi HIPMI dalam mencapai target-target SDGs.

Penggunaan Teori Institusional North dalam penelitian ini memberikan landasan bahwa keberhasilan pencapaian SDGs melalui HIPMI tidak hanya bergantung pada modal finansial, tetapi pada kualitas institusional. Model penelitian membuktikan bahwa ketika institusi formal (HIPMI) bersinergi dengan institusi informal yang luhur (Maqasid Syariah), maka akan tercipta sebuah ekosistem yang mampu mengarahkan perilaku individu menuju kemaslahatan publik yang berkelanjutan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Dalam perspektif kewirausahaan sosial, Teori Institusional menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah (Dukungan Eksternal) menyediakan kerangka kerja formal yang melegitimasi sektor sosial. Dukungan ini menurunkan hambatan bagi pengusaha sosial untuk mengakses modal dan pasar. Sementara itu, organisasi seperti HIPMI berperan sebagai kekuatan institusional yang memperkuat norma kewirausahaan dan memfasilitasi transfer pengetahuan di antara anggotanya, yang secara kolektif membentuk Ekosistem Kewirausahaan Sosial (Urbano & Salder, 2018).

Berdasarkan pandangan North (1990), Dukungan Eksternal dalam penelitian ini diposisikan sebagai institusi formal yang membentuk batasan insentif,

sedangkan HIPMI berperan sebagai organisasi (*player*) yang menavigasi aturan tersebut untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan sosial guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Dalam karya monumentalnya, *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis*, Gary Becker (1964) merevolusi pandangan ekonomi tradisional dengan menyatakan bahwa manusia bukan sekadar faktor produksi (tenaga kerja) mentah, melainkan sebuah bentuk kapital atau modal. Menurut Becker (1964), *Human Capital* (Modal Manusia) adalah kumpulan pengetahuan, keterampilan, kesehatan, dan nilai-nilai yang melekat pada individu yang diperoleh melalui investasi. Investasi yang paling utama dalam modal manusia adalah pendidikan dan pelatihan kerja (*on-the-job training*). Becker berpendapat bahwa individu yang berinvestasi pada diri mereka sendiri—melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karakter—akan memperoleh imbal hasil (*return*) berupa produktivitas yang lebih tinggi dan peningkatan kesejahteraan di masa depan.

Inti dari teori Becker adalah konsep investasi. Individu akan memutuskan untuk menginvestasikan waktu dan biaya (termasuk *opportunity cost*) untuk pendidikan atau pelatihan jika mereka mengharapkan imbal hasil di masa depan, baik dalam bentuk peningkatan pendapatan, kepuasan kerja, maupun efisiensi dalam produksi (Becker, 1964). Dalam konteks kewirausahaan, modal manusia meningkatkan kemampuan individu untuk mengidentifikasi peluang bisnis, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan menavigasi risiko pasar (Schultz, 1975).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Becker membedakan antara dua jenis modal manusia:

1. *General Human Capital*: Keterampilan yang berguna di berbagai perusahaan atau sektor (misalnya: kemampuan literasi atau manajemen dasar).
2. *Specific Human Capital*: Keterampilan yang hanya berguna dalam konteks organisasi atau industri tertentu. Dalam penelitian ini, peran HIPMI dalam memberikan mentoring spesifik bagi pengusaha muda dapat dikategorikan sebagai pengembangan modal manusia spesifik yang memperkuat daya saing anggota dalam ekosistem (Becker, 1962, 1964).

Teori ini menjadi landasan bagi variabel Karakteristik Kewirausahaan Sosial. Atribut individu seperti inovasi, resiliensi, kepemimpinan, dan empati sosial dipandang sebagai bentuk *Human Capital* yang esensial. Becker menekankan bahwa modal manusia bersifat *non-transferable* (melekat pada individu), sehingga kualitas ekosistem kewirausahaan di HIPMI sangat ditentukan oleh akumulasi modal manusia para anggotanya. Semakin tinggi kualitas karakteristik kewirausahaan sosial individu, semakin besar kapasitas mereka dalam menciptakan nilai sosial yang berkelanjutan.

Meskipun Becker awalnya fokus pada aspek ekonomi, pengembangan teori ini dalam konteks model penelitian ini mengintegrasikan dimensi etis. Modal manusia dalam pandangan Becker mencakup aspek perilaku dan moralitas yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Modal manusia yang unggul secara intelektual dan spiritual ini yang menjadi motor penggerak bagi keberhasilan ekosistem.

Becker menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu bangsa lebih ditentukan oleh peningkatan modal manusia daripada modal fisik. Dalam konteks SDGs, teori ini memberikan pembenaran ilmiah bahwa kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai jika aktor-aktornya (pengusaha muda HIPMI) memiliki kapasitas modal manusia yang memadai. Dengan kata lain, pencapaian target SDGs adalah "dividen" dari investasi pada karakteristik kewirausahaan sosial yang berkualitas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Dalam kewirausahaan sosial, modal manusia tidak hanya diukur dari kemampuan menghasilkan profit, tetapi juga kapasitas untuk menciptakan dampak sosial (*social impact*). Karakteristik wirausaha sosial yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman tinggi (sebagai bentuk *human capital*) cenderung lebih efektif dalam mengintegrasikan misi sosial dengan strategi bisnis (Estrin et al., 2016). Peningkatan modal manusia melalui organisasi seperti HIPMI secara langsung berkontribusi pada pencapaian SDGs, khususnya SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) dan SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), karena modal manusia yang unggul adalah mesin penggerak pembangunan berkelanjutan.

Penggunaan *Human Capital Theory* dalam penelitian ini memposisikan pengusaha muda sebagai subjek aktif pembangunan. Tanpa modal manusia yang kuat, dukungan eksternal maupun kebijakan institusional tidak akan mampu menghasilkan dampak yang optimal bagi kemaslahatan umat. Mengacu pada *Human Capital Theory* (Becker, 1964), karakteristik kewirausahaan sosial dalam model penelitian ini dipandang sebagai aset takberwujud (*intangible asset*) yang menggerakkan inovasi sosial.

Peningkatan kapasitas pengusaha muda melalui HIPMI pada dasarnya adalah bentuk investasi modal manusia sebagaimana dijelaskan oleh Becker (1964). Dengan meningkatnya modal manusia anggota, maka Ekosistem Kewirausahaan Sosial akan semakin solid, yang pada akhirnya mengakselerasi pencapaian target-target dalam SDGs.

Konsep *entrepreneurship ecosystem* menjadi salah satu pendekatan penting dalam studi kewirausahaan modern yang menekankan pentingnya lingkungan institusional dan sosial dalam mendukung pertumbuhan usaha baru. Salah satu tokoh yang mempopulerkan konsep ini adalah Daniel Isenberg melalui gagasannya tentang *Entrepreneurship Ecosystem Strategy* yang diperkenalkan pada tahun 2011. Isenberg memandang bahwa kewirausahaan tidak berkembang secara terpisah, tetapi muncul dari interaksi kompleks antara berbagai aktor, institusi, dan sumber daya dalam suatu lingkungan ekonomi tertentu.

Daniel Isenberg (2011) melalui pemikirannya dalam *The Entrepreneurship Ecosystem Strategy*, melakukan dekonstruksi terhadap pandangan tradisional yang hanya berfokus pada sifat-sifat psikologis individu wirausaha. Menurut Isenberg, ekosistem kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai jaringan institusi yang saling terhubung yang bertujuan membantu wirausahawan melalui seluruh tahapan pengembangan usaha baru. Dalam ekosistem ini, wirausahawan menjadi pusat aktivitas dan keberhasilan sistem diukur dari kemampuan lingkungan tersebut dalam melahirkan dan menumbuhkan perusahaan baru yang inovatif.

Isenberg menegaskan bahwa strategi pembangunan ekonomi berbasis ekosistem kewirausahaan merupakan pendekatan yang relatif baru dan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi. Strategi ini dianggap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi munculnya kewirausahaan dalam skala besar serta mempercepat transformasi menuju ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*).

Isenberg berargumen bahwa kewirausahaan bukan fenomena isolasi, melainkan hasil dari interaksi dinamis dalam sebuah ekosistem. Sebuah ekosistem yang sehat tidak tercipta secara kebetulan, melainkan melalui penguatan elemen-elemen lingkungan yang saling berkelindan secara sistemik untuk mendukung penciptaan dan pertumbuhan usaha.

Karakteristik utama dari ekosistem Isenberg adalah sifatnya yang holistik. Kegagalan atau lemahnya satu pilar (misalnya pilar keuangan yang lemah di tengah kebijakan yang kuat) akan menghambat kinerja sistem secara keseluruhan. Isenberg menekankan bahwa tujuan akhir dari strategi ekosistem adalah menciptakan siklus yang mampu menghidupi dirinya sendiri (*self-sustaining*), di mana kesuksesan satu wirausaha akan menghasilkan modal dan inspirasi bagi generasi berikutnya.

Penerapan model Isenberg dalam penelitian ini memberikan kerangka kerja operasional untuk mengukur sejauh mana HIPMI dan pemerintah telah membangun "tanah yang subur" bagi kewirausahaan sosial. Model yang dihasilkan akan menyempurnakan perspektif Isenberg dengan menambahkan dimensi Maqasid Syariah sebagai nilai spiritual yang mengikat seluruh pilar tersebut, sehingga ekosistem yang terbentuk tidak hanya efisien secara ekonomi tetapi juga bermakna secara teologis (*maslahah*).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Selaras dengan *Entrepreneurship Ecosystem Strategy* (Isenberg, 2011), pembentukan ekosistem kewirausahaan sosial di HIPMI memerlukan sinergi enam domain utama. Penelitian ini membuktikan bahwa penguatan domain dukungan institusi dan eksternal secara kolektif akan mengoptimalkan kapasitas ekosistem dalam memfasilitasi pengusaha muda mencapai target-target SDGs.

Konsep *Triple Helix Model* merupakan salah satu kerangka teoritis penting dalam studi inovasi dan pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Henry Etzkowitz dan Loet Leydesdorff pada akhir 1990-an dan dipublikasikan secara luas dalam berbagai karya mereka sekitar tahun 2000. Model ini menjelaskan bahwa inovasi dan pertumbuhan ekonomi modern

tidak hanya bergantung pada aktivitas individu atau perusahaan, tetapi juga pada interaksi yang dinamis antara universitas, industri, dan pemerintah (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000).

Triple Helix Model menekankan bahwa ketiga aktor tersebut membentuk sebuah sistem hubungan yang saling berinteraksi dan saling memperkuat dalam menghasilkan inovasi, pengetahuan, dan pertumbuhan ekonomi. Universitas berperan sebagai penghasil pengetahuan dan teknologi, industri berfungsi sebagai aktor yang mengkomersialisasikan inovasi, sedangkan pemerintah bertindak sebagai regulator sekaligus fasilitator yang menciptakan lingkungan kebijakan yang kondusif bagi pengembangan inovasi (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000).

Menurut Etzkowitz dan Leydesdorff, perkembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*) menuntut perubahan peran tradisional dari masing-masing institusi. Dalam model ini, universitas tidak lagi hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan penelitian, tetapi juga berperan aktif dalam kegiatan kewirausahaan melalui pembentukan *spin-off companies*, inkubator bisnis, serta kerja sama riset dengan sektor industri. Fenomena ini dikenal sebagai konsep *entrepreneurial university*, yaitu universitas yang terlibat langsung dalam proses inovasi dan komersialisasi pengetahuan (Etzkowitz, 2003).

Di sisi lain, sektor industri dalam kerangka Triple Helix tidak hanya berperan sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam proses penelitian dan pengembangan (*research and development*). Industri bekerja sama dengan universitas untuk menghasilkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan pasar. Sementara itu, pemerintah berfungsi sebagai aktor yang menciptakan regulasi, kebijakan inovasi, serta menyediakan dukungan finansial maupun infrastruktur yang diperlukan untuk memperkuat hubungan antara universitas dan industri (Leydesdorff & Etzkowitz, 2001).

Model Triple Helix juga menekankan pentingnya interaksi dan kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan ekosistem inovasi yang berkelanjutan. Dalam sistem ini, batas-batas antara universitas, industri, dan pemerintah menjadi semakin fleksibel sehingga memungkinkan munculnya berbagai bentuk kolaborasi baru, seperti pusat inovasi, taman sains (*science parks*), inkubator bisnis, dan klaster

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

teknologi. Kolaborasi ini menghasilkan sinergi yang mampu mempercepat transfer pengetahuan dari dunia akademik ke sektor industri serta meningkatkan daya saing ekonomi suatu wilayah (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000).

Lebih lanjut, Etzkowitz dan Leydesdorff menjelaskan bahwa keberhasilan model Triple Helix sangat bergantung pada kualitas interaksi antara ketiga aktor tersebut. Semakin kuat hubungan kolaboratif antara universitas, industri, dan pemerintah, maka semakin besar pula potensi terciptanya inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, banyak negara mengadopsi pendekatan Triple Helix dalam merancang kebijakan inovasi dan pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan.

Dalam perkembangannya, konsep Triple Helix telah menjadi salah satu kerangka analisis yang banyak digunakan dalam penelitian mengenai inovasi, kewirausahaan, dan pembangunan ekonomi regional. Model ini juga menjadi dasar bagi pengembangan konsep lanjutan seperti *Quadruple Helix* yang menambahkan peran masyarakat sipil dan *Quintuple Helix* yang memasukkan aspek lingkungan dalam sistem inovasi. Dengan demikian, Triple Helix Model tetap menjadi fondasi penting dalam memahami dinamika kolaborasi antara sektor akademik, industri, dan pemerintah dalam menciptakan ekosistem inovasi yang berkelanjutan.

Model *Triple Helix* merupakan kerangka kerja inovasi yang menekankan pada interaksi dinamis antara tiga aktor utama dalam pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*): Universitas/Akademisi, Industri/Sektor Swasta, dan Pemerintah. Etzkowitz dan Leydesdorff (2000) berpendapat bahwa kunci pertumbuhan ekonomi dan inovasi di era modern tidak lagi terletak pada peran tunggal salah satu aktor, melainkan pada sinergi dan persilangan peran (*overlapping roles*) di antara ketiganya. Etzkowitz menekankan bahwa *Triple Helix* adalah sebuah proses transisi yang berkelanjutan. Ketika ketiga aktor ini berinteraksi, mereka akan menciptakan Infrastruktur Pengetahuan yang hibrida.

Mengacu pada *Triple Helix Model* (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000), akselerasi SDGs dalam model penelitian ini dicapai melalui sinergi fungsional antara dukungan eksternal (pemerintah), peran institusi organisasi (HIPMI), dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

pengembangan modal manusia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kekuatan interaksi antar-aktor ini merupakan determinan utama dalam memperkuat ekosistem kewirausahaan sosial yang resilien.

Dalam konteks penelitian ini, HIPMI diposisikan sebagai salah satu aktor utama dalam ekosistem kewirausahaan yang memiliki peran penting dalam mendorong terciptanya inovasi sosial dan pencapaian target SDGs melalui pengembangan pengusaha muda. HIPMI dijadikan sebagai bagian dari sistem kewirausahaan nasional yang harus berinteraksi secara aktif dengan elemen lain seperti pemerintah, akademisi, investor, dan masyarakat. Sinergi ini memungkinkan penciptaan inovasi sosial yang berorientasi pada keberlanjutan.

Teori stakeholder merupakan salah satu kerangka konseptual penting dalam kajian manajemen strategis dan tata kelola organisasi. Konsep ini pertama kali dikemukakan secara sistematis oleh R. Edward Freeman dalam bukunya yang berjudul *Strategic Management: A Stakeholder Approach* yang diterbitkan pada tahun 1984. Freeman memperkenalkan pendekatan baru dalam memahami hubungan antara organisasi dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap aktivitas organisasi tersebut.

Menurut Freeman (1984), stakeholder adalah setiap individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Definisi ini memperluas pandangan tradisional yang sebelumnya hanya menekankan kepentingan pemegang saham (*shareholders*) sebagai pihak utama dalam organisasi. Dalam perspektif stakeholder, organisasi harus mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak seperti karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, masyarakat, serta komunitas lokal dalam proses pengambilan keputusan strategis (Freeman, 1984).

Teori stakeholder menekankan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam mengelola hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan. Dengan kata lain, organisasi perlu memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari aktivitas yang dilakukannya. Pendekatan ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

mendorong organisasi untuk menciptakan nilai bersama (*shared value*) bagi seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem organisasi (Freeman, 1984).

Dalam kerangka teori stakeholder, manajemen organisasi memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengelola kepentingan berbagai kelompok stakeholder secara seimbang. Hal ini dilakukan melalui komunikasi yang efektif, transparansi dalam pengambilan keputusan, serta penerapan praktik tata kelola yang baik (*good governance*). Dengan demikian, hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan para stakeholder dapat tercipta secara berkelanjutan.

Freeman juga menjelaskan bahwa stakeholder dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu stakeholder primer dan stakeholder sekunder. Stakeholder primer adalah pihak-pihak yang secara langsung berkontribusi terhadap keberlangsungan organisasi, seperti investor, karyawan, pelanggan, dan pemasok. Sementara itu, stakeholder sekunder adalah pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas operasional organisasi tetapi tetap memiliki pengaruh terhadap reputasi dan keberlanjutan organisasi, seperti media, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas.

Dalam perkembangan literatur manajemen, teori stakeholder telah menjadi dasar bagi berbagai kajian mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), keberlanjutan (*sustainability*), dan tata kelola organisasi. Pendekatan ini menekankan bahwa organisasi harus mengintegrasikan kepentingan ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam strategi bisnisnya. Oleh karena itu, teori stakeholder tidak hanya relevan bagi perusahaan bisnis, tetapi juga bagi organisasi publik, lembaga nirlaba, serta institusi pendidikan yang berinteraksi dengan berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat.

Dengan demikian, teori stakeholder memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami dinamika hubungan antara organisasi dan lingkungan eksternalnya. Melalui pengelolaan stakeholder yang efektif, organisasi dapat meningkatkan legitimasi sosial, memperkuat reputasi, serta menciptakan keberlanjutan jangka panjang dalam aktivitasnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Middle-Range Theory pada penelitian ini digunakan Teori Kewirausahaan Sosial (*Social Entrepreneurship Theory*). Teori kewirausahaan sosial menjelaskan bagaimana individu atau kelompok menciptakan dan mengelola usaha yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah sosial secara berkelanjutan. Menurut Dees (1998) dan Zahra et al. (2009), pengusaha sosial tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga nilai sosial sebagai tujuan utama.

HIPMI, sebagai organisasi pengusaha muda, memiliki potensi besar dalam mencetak pelaku kewirausahaan sosial yang tidak hanya memperkuat perekonomian, tetapi juga menciptakan dampak sosial positif yang mendukung agenda SDGs. Pengusaha muda HIPMI tidak hanya dilihat sebagai pencipta lapangan kerja, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial. Mereka mampu mengenali peluang sosial dan mengembangkan usaha yang menghasilkan dampak positif bagi masyarakat. Selain itu, teori *Triple Bottom Line* (Elkington, 1997) menekankan bahwa kewirausahaan sosial harus mempertimbangkan tiga dimensi, yaitu *profit* (ekonomi), *people* (sosial), dan *planet* (lingkungan). Teori ini sesuai untuk menjelaskan integrasi nilai SDGs dalam aktivitas kewirausahaan HIPMI. Pada *middle theory* ini juga digunakan teori *Entrepreneurial Ecosystem Framework* (Isenberg, 2010) yang menjelaskan bahwa kewirausahaan berkembang dalam ekosistem yang mencakup: kebijakan, pendanaan, budaya, dukungan pasar, SDM, dan infrastruktur. Teori ini menjadi fondasi untuk membangun model ekosistem kewirausahaan HIPMI.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Jasser Auda (2008) dalam bukunya *"Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach"*, melakukan rekonstruksi fundamental terhadap pemikiran hukum Islam klasik. Jika pendekatan tradisional memandang Maqasid secara statis sebagai upaya perlindungan (*Hifdz*) terhadap lima unsur pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), Auda mentransformasi konsep tersebut menjadi pendekatan sistem yang dinamis. Maqasid bukan lagi sekadar batasan hukum, melainkan tujuan pembangunan manusia (*human development*) yang selaras dengan kemaslahatan publik (*Maslahah*).

Auda menekankan bahwa Maqasid harus dipahami melalui fitur-fitur sistem, seperti Kognisi (*Cognition*) dan Keutuhan (*Wholeness*). Dalam model

penelitian ini, Maqasid Syariah (M) bertindak sebagai variabel mediasi yang mengintegrasikan aspek material dari Ekosistem (Y1) dengan aspek spiritual. Salah satu kontribusi pemikiran Auda yang paling relevan bagi disertasi ini adalah konvergensi antara Maqasid Syariah dengan isu-isu global. Auda berargumen bahwa setiap upaya yang mendukung keadilan sosial, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan ekonomi pada dasarnya adalah implementasi dari Maqasid.

Melalui pendekatan sistem Maqasid al-Shariah (Auda, 2008), penelitian ini memposisikan nilai spiritual sebagai variabel integratif dalam ekosistem kewirausahaan. Hasil analisis membuktikan bahwa internalisasi Maqasid yang dipahami secara dinamis mampu mengakselerasi kontribusi pengusaha muda HIPMI terhadap target SDGs melalui orientasi kemaslahatan yang multidimensi.

Sebagai pendekatan terapan, penelitian ini memanfaatkan kombinasi dari beberapa teori dan model:

a. *Model Triple Helix* (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000): Menekankan pentingnya kolaborasi antara akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah dalam mendorong inovasi sosial.
b. Teori *Stakeholder* (Freeman, 1984): Menjelaskan bagaimana pentingnya peran dan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang inklusif dan berkelanjutan.
c. Kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Sebagai pedoman global yang menjadi orientasi utama dalam menciptakan nilai sosial dan lingkungan melalui praktik kewirausahaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Melalui *Applied Theory,* yaitu *Triple Helix Model,* Teori *Stakeholder*, *Maqasid Systems Approach* dan Kerangka SDGs, dikembangkan pendekatan kolaboratif dan multisektor dalam membangun ekosistem kewirausahaan sosial. Keterlibatan semua pemangku kepentingan serta integrasi tujuan pembangunan berkelanjutan menjadi landasan dalam membentuk model yang akan dikembangkan. Dengan menerapkan teori-teori ini, diharapkan dapat dikembangkan suatu model operasional ekosistem kewirausahaan sosial berbasis HIPMI yang terintegrasi dengan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Model

praktis ini digunakan untuk menyusun strategi penguatan peran HIPMI dalam menciptakan ekosistem *sosial-enterprise* yang mendukung SDGs.

2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

a. Definisi dan Tujuan SDGs

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah serangkaian 17 tujuan global yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai agenda pembangunan dunia untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, melindungi lingkungan, serta memastikan kesejahteraan bersama hingga tahun 2030. UN General Assembly (2015), SDGs diluncurkan secara resmi pada 25 September 2015 melalui Resolusi PBB A/RES/70/1, dengan tajuk *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development.* Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan kelanjutan dari Millennium Development Goals (MDGs) yang berlaku dari tahun 2000 hingga 2015. (UN, 2015). Menurut Sachs (2015), SDGs mewakili pergeseran paradigma pembangunan dari yang sebelumnya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, menjadi pembangunan yang terintegrasi secara holistik. SDGs mencakup 17 tujuan dan 169 target yang dirancang untuk mengatasi tantangan global paling mendesak, mulai dari kemiskinan dan ketidaksetaraan hingga perubahan iklim dan degradasi lingkungan.

MDGs terdiri dari 8 tujuan global yang berfokus pada pengurangan kemiskinan, peningkatan pendidikan, dan kesehatan dasar. Meskipun MDGs berhasil mendorong beberapa capaian positif (seperti penurunan angka kemiskinan ekstrem dan perluasan pendidikan dasar), terdapat kritik bahwa pendekatannya terlalu sempit dan kurang inklusif, serta tidak cukup menekankan aspek keberlanjutan lingkungan dan partisipasi global.

Pada tahun 2012, dalam Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan di Brasil, muncul kesepakatan global untuk merumuskan kerangka pembangunan baru pasca-2015, yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Konferensi ini menghasilkan dokumen berjudul *"The Future We Want"* yang menjadi dasar awal lahirnya SDGs. Setelah proses konsultasi global selama lebih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

dari dua tahun, melibatkan pemerintah, LSM, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil, maka pada 25 September 2015, 193 negara anggota PBB menyepakati dokumen "Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development", yang berisi 17 tujuan dan 169 target. (UNDP (2016)

SDGs resmi berlaku mulai 1 Januari 2016 dan menjadi panduan pembangunan global hingga tahun 2030. Agenda ini menekankan prinsip *"Leave No One Behind"*, yaitu tidak seorang pun boleh tertinggal dalam proses pembangunan. Berbeda dengan MDGs yang hanya berlaku untuk negara berkembang, SDGs berlaku universal untuk seluruh negara, baik maju maupun berkembang. Griggs et al. (2013); UNDP (2016).

Salah satu pembeda utama SDGs dengan agenda sebelumnya adalah penekanan pada peran strategis Sektor Privat dan Wirausaha. Menurut Schaltegger et al. (2016), kewirausahaan adalah motor penggerak utama inovasi yang diperlukan untuk mencapai target-target SDGs. Di Indonesia, keterlibatan HIPMI menjadi sangat relevan karena pengusaha muda memiliki fleksibilitas dan daya inovasi yang lebih tinggi untuk mengadopsi model bisnis inklusif yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2.2
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

No.	Tujuan SDGs	Deskripsi Singkat
1	Tanpa Kemiskinan	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di seluruh tempat
2	Tanpa Kelaparan	Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan gizi yang baik
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Menjamin kehidupan sehat dan mendukung kesejahteraan semua usia
4	Pendidikan Berkualitas	Menjamin pendidikan inklusif dan berkualitas serta kesempatan belajar sepanjang hayat
5	Kesetaraan Gender	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

No.	Tujuan SDGs	Deskripsi Singkat
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	Menjamin akses terhadap air bersih dan sanitasi untuk semua
7	Energi Bersih dan Terjangkau	Menjamin akses energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak bagi semua
9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	Membangun infrastruktur tangguh dan mendorong industrialisasi serta inovasi
10	Berkurangnya Kesenjangan	Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, dan berkelanjutan
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	Menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
13	Penanganan Perubahan Iklim	Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya
14	Ekosistem Laut	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut
15	Ekosistem Daratan	Melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan ekosistem daratan secara berkelanjutan
16	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	Mendorong masyarakat damai dan inklusif dengan akses keadilan dan lembaga terpercaya
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	Menguatkan cara pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan

Secara teoretis, SDGs berpijak pada konsep *Triple Bottom Line* (*Profit, People, Planet*), yang menekankan keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan (Elkington, 1997). Dalam konteks penelitian ini, pencapaian SDGs oleh pengusaha muda HIPMI bukan hanya tentang keberlanjutan bisnis secara finansial, tetapi bagaimana bisnis tersebut mampu memberikan nilai tambah sosial

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

(*social value*) dan melestarikan lingkungan. SDGs memberikan standar pengukuran universal bagi dampak yang dihasilkan oleh kewirausahaan sosial.

Tujuan utama SDGs adalah mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan, dengan menyeimbangkan tiga dimensi utama:

1. Sosial (pengurangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan),
2. Ekonomi (pertumbuhan, pekerjaan, inovasi), dan
3. Lingkungan (iklim, laut, ekosistem darat).

b. Manfaat dan Prinsip SDGs

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan agenda global yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015. SDGs mencakup 17 tujuan dan 169 target yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet ini, dan memastikan bahwa semua orang menikmati perdamaian dan kemakmuran pada tahun 2030 (United Nations, 2015). Di antara manfaat SDGs adalah:

1) Kerangka Arah Pembangunan yang Inklusif; SDGs menyediakan kerangka pembangunan yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terpadu, yang dapat digunakan oleh pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi untuk merancang kebijakan berkelanjutan.
2) Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan; Dengan tujuan seperti SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDG 10 (Mengurangi Ketimpangan), SDGs mendorong kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan.
3) Mendorong Inovasi dan Kewirausahaan Sosial; SDGs membuka peluang bagi inovator dan wirausaha sosial untuk menciptakan solusi yang menjawab tantangan sosial, seperti akses pendidikan (SDG 4), energi terjangkau (SDG 7), dan pekerjaan layak (SDG 8).
4) Penguatan Kemitraan Global; SDG 17 menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan negara dalam mengimplementasikan program pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

Prinsip-prinsip SDGs adalah:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

1) Universalitas

   SDGs berlaku untuk semua negara, baik maju maupun berkembang, dan menuntut komitmen kolektif untuk mencapai tujuan global.
2) Interkoneksi dan Indivisibilitas; Tiap tujuan saling terkait. Misalnya, pencapaian pendidikan berkualitas (SDG 4) akan mendukung pengurangan kemiskinan (SDG 1) dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8).
3) Inklusivitas: *Leave No One Behind*; Prinsip ini menekankan pentingnya menjangkau kelompok paling rentan agar tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan.
4) Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM); SDGs memperkuat perlindungan terhadap hak individu dan kelompok, dengan pendekatan pembangunan yang partisipatif dan adil.
5) Berorientasi pada Hasil dan Tanggung Jawab Global; SDGs menekankan pelaporan, evaluasi, dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan kebijakan pembangunan di tingkat nasional maupun global.

SDGs merupakan arah baru pembangunan global yang mengedepankan pendekatan sistemik, partisipatif, dan berkelanjutan. Pemahaman yang komprehensif terhadap manfaat dan prinsip-prinsip SDGs menjadi penting untuk mewujudkan agenda pembangunan yang tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan pelestarian lingkungan.

SDGs menyediakan kerangka kerja global yang komprehensif untuk mengukur dampak pembangunan berkelanjutan (Sachs, 2015). Dalam model ISEEM, SDGs ditempatkan sebagai output utama yang mencerminkan keberhasilan ekosistem dan internalisasi Maqasid Syariah dalam mentransformasi peran pengusaha muda HIPMI menjadi agen perubahan sosial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

c. Implementasi SDGs di Indonesia

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda global yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 sebagai kelanjutan dari Millennium Development Goals (MDGs). Agenda ini terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang saling terkait, mencakup

dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan hingga tahun 2030 (UN, 2015). Indonesia, sebagai salah satu negara penandatangan Agenda 2030, telah menunjukkan komitmen kuat dalam mengintegrasikan SDGs ke dalam kebijakan nasional maupun daerah.

Implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia merupakan bagian dari komitmen global pasca disepakatinya United Nations melalui dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* pada tahun 2015. SDGs mencakup 17 tujuan yang terintegrasi dalam dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan prinsip utama *no one left behind* (United Nations, 2015).

Sebagai negara berkembang dengan karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang kompleks, Indonesia mengadopsi SDGs ke dalam kebijakan nasional melalui pendekatan yang sistematis dan terintegrasi. Pemerintah Indonesia secara resmi menginternalisasikan SDGs dalam perencanaan pembangunan nasional melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta menetapkan kerangka kelembagaan melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Bappenas, 2020).

Secara kelembagaan, pelaksanaan SDGs di Indonesia dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas melalui pembentukan *Sekretariat Nasional SDGs Indonesia*. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan *Rencana Aksi Nasional (RAN)* dan *Rencana Aksi Daerah (RAD)* SDGs untuk memandu implementasi di seluruh tingkatan pemerintahan. Selain itu, pelaksanaan SDGs juga melibatkan multi-stakeholder, termasuk sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas lokal. Prinsip *no one left behind* menjadi pondasi penting dalam pelibatan seluruh unsur masyarakat, khususnya kelompok rentan. Peran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sangat strategis sebagai koordinator nasional dalam mengintegrasikan, memantau, dan mengevaluasi capaian SDGs di Indonesia. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan efektivitas pencapaian target-target SDGs (Bappenas, 2020).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

SDGs telah diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Beberapa kebijakan yang mencerminkan komitmen terhadap SDGs antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Indonesia Pintar (PIP), serta berbagai inisiatif transisi energi berkelanjutan dan aksi iklim. Meskipun demikian, implementasi SDGs di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kesenjangan wilayah, kualitas data, koordinasi antarlembaga, dan keterbatasan pendanaan, terutama pascapandemi COVID-19.

Secara empiris, Indonesia menunjukkan kemajuan pada beberapa indikator SDGs, terutama dalam aspek pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Namun demikian, masih terdapat tantangan signifikan, seperti ketimpangan antar wilayah, degradasi lingkungan, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan di tingkat daerah. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi SDGs tidak hanya memerlukan kebijakan yang kuat, tetapi juga dukungan ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan (Sachs et al., 2021).

Dalam konteks ini, kewirausahaan sosial muncul sebagai salah satu instrumen strategis untuk mempercepat pencapaian SDGs di Indonesia. Kewirausahaan sosial mampu menjembatani kesenjangan antara sektor publik dan privat dengan menghadirkan solusi inovatif berbasis masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Jeffrey D. Sachs yang menekankan bahwa pencapaian SDGs memerlukan inovasi berbasis komunitas serta partisipasi aktif dari pelaku ekonomi lokal (Sachs, 2012).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Lebih lanjut, implementasi SDGs di Indonesia juga didorong oleh penguatan peran sektor swasta, termasuk organisasi seperti HIPMI, dalam menciptakan model bisnis yang berorientasi pada dampak sosial dan keberlanjutan. Integrasi prinsip SDGs dalam praktik bisnis tidak hanya meningkatkan daya saing, tetapi juga memperkuat kontribusi sektor usaha terhadap pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, implementasi SDGs di Indonesia dapat dipahami sebagai proses transformasi pembangunan yang bersifat holistik, kolaboratif, dan

berorientasi jangka panjang. Keberhasilan implementasi tersebut sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan pemerintah, kapasitas kelembagaan, serta partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha, termasuk dalam membentuk ekosistem kewirausahaan sosial.

Dalam konteks pembangunan nasional, SDGs tidak hanya menjadi instrumen perencanaan, tetapi juga berperan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan sosial, dan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi SDGs di Indonesia sangat bergantung pada penguatan tata kelola, pengembangan kapasitas daerah, serta kemitraan lintas sektor yang dilakukan secara berkelanjutan.

Tabel 2.3
Contoh Program Implementasi SDGs

Tujuan SDGs	Contoh Program di Indonesia
Goal 1: Tanpa Kemiskinan	Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST)
Goal 3: Kesehatan	JKN/BPJS, imunisasi nasional, program percepatan penanganan stunting
Goal 4: Pendidikan	Program Indonesia Pintar (PIP), Merdeka Belajar
Goal 5: Kesetaraan Gender	Perlindungan pekerja perempuan, UU TPKS, edukasi kesetaraan gender
Goal 7: Energi Bersih	Elektrifikasi desa, program PLTS di daerah terpencil
Goal 13: Iklim	Penanaman mangrove, transisi energi terbarukan, Net Zero Emission 2060

Sumber: Bappenas, 2020

Meskipun Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat terhadap pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan struktural, teknis, dan sosial. SDGs sebagai agenda global yang kompleks memerlukan keterpaduan lintas sektor dan aktor, serta kapasitas kelembagaan yang solid. Dalam konteks Indonesia, implementasi SDGs telah diintegrasikan dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 dan diperkuat dengan Rencana Aksi Nasional (RAN SDGs) serta Rencana Aksi Daerah (RAD SDGs). Namun, berbagai kendala masih menghambat pencapaian tujuan-tujuan tersebut secara optimal.

Salah satu kendala utama adalah kurangnya koordinasi antar lembaga, baik vertikal antara pusat dan daerah, maupun horizontal antar kementerian atau instansi terkait (Bappenas, 2020; Sachs, J. D., et al. (2022). Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih program, lemahnya sinergi, serta lambatnya respons terhadap tantangan lokal. Selain itu, ketersediaan dan kualitas data juga menjadi isu krusial. Banyak indikator SDGs yang memerlukan data terpilah—berdasarkan gender, usia, wilayah, dan disabilitas—namun hingga kini, masih terdapat keterbatasan dalam hal pengumpulan dan pemutakhiran data yang valid dan dapat dibandingkan secara nasional.

Aspek pendanaan menjadi kendala berikutnya, mengingat anggaran pemerintah yang terbatas dan ketergantungan terhadap bantuan luar negeri dalam pelaksanaan beberapa program SDGs (Gupta, J., & Vegelin, C., 2016). Sementara itu, kapasitas teknis pemerintah daerah juga belum merata, terutama dalam hal perencanaan, implementasi, serta monitoring dan evaluasi berbasis SDGs. Dalam banyak kasus, pemerintah daerah belum sepenuhnya memahami konsep SDGs atau kesulitan dalam menerjemahkan tujuan global ke dalam konteks lokal melalui program kerja yang dirancang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Tantangan lainnya mencakup minimnya pelibatan masyarakat sipil dan sektor swasta, yang seharusnya menjadi mitra kunci dalam pelaksanaan SDGs. Kemitraan yang terbentuk cenderung simbolis dan belum sepenuhnya partisipatif. Selain itu, kesenjangan wilayah juga menjadi hambatan signifikan, di mana daerah-daerah di Indonesia bagian timur mengalami keterbatasan infrastruktur, akses pendidikan dan kesehatan, serta kapasitas pembangunan secara umum (Bappenas, 2020). Menurut United Nation (2023), pandemi COVID-19 turut memperburuk kondisi ini, dengan menambah tekanan terhadap sistem kesehatan, pendidikan, dan ekonomi lokal, serta memperlambat pencapaian berbagai target SDGs.

Secara keseluruhan, implementasi SDGs di Indonesia masih membutuhkan penguatan dalam aspek tata kelola, pendanaan berkelanjutan, peningkatan kapasitas daerah, serta pembangunan sistem pemantauan dan pelaporan yang lebih transparan dan terintegrasi. Upaya kolaboratif lintas sektor dan inovasi kebijakan menjadi kunci penting untuk mengatasi berbagai kendala tersebut dan memastikan bahwa prinsip *No One Left Behind* dapat diwujudkan secara nyata.

Tabel 2.4
Kendala Implementasi SDGs di Indonesia

No.	Aspek Kendala	Penjelasan
1	Koordinasi Antar Lembaga	Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antar instansi belum optimal dan sering tumpang tindih.
2	Kualitas dan Ketersediaan Data	Ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terpilah (gender, disabilitas, wilayah) masih terbatas.
3	Pendanaan	Keterbatasan anggaran nasional dan daerah, serta ketergantungan terhadap pembiayaan dari donor.
4	Kapasitas Daerah	Tidak semua pemerintah daerah memiliki pemahaman atau kapasitas teknis yang memadai untuk mengimplementasikan SDGs.
5	Pemantauan dan Evaluasi	Sistem monitoring dan evaluasi masih lemah, terutama dalam pengukuran dampak dan ketercapaian target SDGs.
6	Kesenjangan Wilayah	Ketimpangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia berdampak pada distribusi capaian SDGs.
7	Partisipasi Stakeholder	Pelibatan sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas lokal belum merata dan masih bersifat simbolis di beberapa daerah.
8	Dampak Pandemi COVID-19	Pandemi menyebabkan kemunduran capaian pada beberapa target, seperti kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan.

Sejak disepakatinya Agenda 2030 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015, Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung dan mengimplementasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Komitmen tersebut tercermin dalam integrasi SDGs ke

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

dalam *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*, serta pembentukan *Sekretariat Nasional SDGs Indonesia* di bawah koordinasi Kementerian PPN/Bappenas. Hingga saat ini, sejumlah capaian positif telah menunjukkan bahwa Indonesia berhasil mengadopsi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (SDGs) dalam praktik kebijakan dan program pembangunan nasional.

Salah satu capaian yang menonjol adalah penurunan angka kemiskinan, yang didorong oleh berbagai program seperti *Program Keluarga Harapan (PKH)*, *Bantuan Sosial Tunai*, dan *Kartu Sembako*. Program-program ini berkontribusi signifikan terhadap pencapaian Goal 1: Tanpa Kemiskinan. Selain itu, dalam bidang kesehatan (Goal 3), Indonesia berhasil meningkatkan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), memperluas program imunisasi, dan memperkuat intervensi percepatan penanganan stunting.

Keberhasilan lainnya tercermin pada kemajuan dalam akses pendidikan (Goal 4) melalui program *Indonesia Pintar*, serta dukungan pada pendidikan vokasi dan digitalisasi pembelajaran. Dalam bidang energi, Indonesia juga telah mencatat peningkatan signifikan pada penyediaan energi bersih dan terjangkau (Goal 7), melalui proyek elektrifikasi desa dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di daerah terpencil. Pada saat yang sama, pemerintah juga mendorong penggunaan energi baru dan terbarukan sebagai bagian dari transisi menuju ekonomi rendah karbon.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Capaian lainnya mencakup penguatan institusi melalui reformasi birokrasi (Goal 16), peningkatan inklusi keuangan melalui layanan digital (Goal 8 dan 9), serta kolaborasi multi-pihak melalui *Platform Kemitraan SDGs Indonesia*, yang mempertemukan aktor dari sektor publik, swasta, masyarakat sipil, dan akademisi (Goal 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).

Meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan, keberhasilan-keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendekatan multi-sektor, kolaboratif, dan terintegrasi menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan SDGs di Indonesia. Inovasi kebijakan, perbaikan tata kelola, serta penggunaan data dan teknologi juga

memainkan peran penting dalam mempercepat pencapaian target SDGs, khususnya pada wilayah dan kelompok masyarakat yang sebelumnya tertinggal.

d. Keterkaitan SDGs dengan Kewirausahaan Sosial dan Peran HIPMI

Implementasi *Sustainable Development Goals (*SDGs**)** di Indonesia tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif aktor non-negara, termasuk sektor swasta dan organisasi kewirausahaan seperti Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Dalam konteks ini, kewirausahaan sosial menjadi pendekatan strategis yang mampu menjembatani tujuan ekonomi dan sosial secara simultan.

Secara konseptual, kewirausahaan sosial merupakan bentuk inovasi yang berorientasi pada penciptaan nilai sosial melalui mekanisme bisnis. Menurut Johanna Mair dan Ignasi Marti (2006), kewirausahaan sosial berfungsi sebagai katalis dalam menyelesaikan kegagalan pasar (*market failure*) dan keterbatasan intervensi pemerintah. Dengan demikian, kewirausahaan sosial memiliki relevansi yang kuat dalam mendukung pencapaian SDGs, khususnya pada aspek pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kerangka implementasi SDGs di Indonesia, organisasi seperti HIPMI berperan sebagai aktor penggerak ekosistem kewirausahaan, yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengarahkan anggotanya untuk mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan dalam praktik bisnis. Peran ini mencakup penyediaan akses jaringan, pelatihan, advokasi kebijakan, serta fasilitasi kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, HIPMI dapat diposisikan sebagai *intermediary institution* yang memperkuat keterhubungan antara pengusaha muda dan agenda pembangunan berkelanjutan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Keterkaitan antara implementasi SDGs dan karakteristik kewirausahaan sosial mempunyai hubungan yang erat. Karakteristik individu pengusaha sosial, seperti inovasi, orientasi sosial, dan komitmen terhadap keberlanjutan, merupakan determinan utama dalam mendukung pencapaian SDGs. Pengusaha yang memiliki kesadaran tinggi terhadap isu sosial cenderung menghasilkan model bisnis yang inklusif dan berorientasi dampak.

Dalam perspektif Muhammad Yunus (2010), bisnis sosial dirancang untuk menyelesaikan masalah sosial secara berkelanjutan, sehingga secara langsung berkontribusi terhadap target-target SDGs. Oleh karena itu, semakin kuat karakteristik kewirausahaan sosial yang dimiliki anggota HIPMI, semakin besar kontribusi terhadap pencapaian SDGs.

Keberhasilan implementasi SDGs sangat dipengaruhi oleh kualitas ekosistem kewirausahaan. Menurut Erik Stam (2015), ekosistem yang kondusif terdiri dari elemen seperti akses pendanaan, jaringan, kebijakan, dan budaya kewirausahaan. Dalam konteks HIPMI, dukungan ekosistem yang kuat memungkinkan pengusaha sosial untuk mengakses sumber daya yang diperlukan, memperluas jaringan kolaborasi, dan meningkatkan kapasitas inovasi sosial. Hal ini pada akhirnya mempercepat pencapaian SDGs melalui peningkatan dampak sosial dan ekonomi dari kegiatan usaha.

HIPMI memiliki posisi strategis dalam mengintegrasikan agenda SDGs ke dalam praktik kewirausahaan di Indonesia. Peran ini dapat dilihat melalui:

1) pengembangan kapasitas pengusaha muda,
2) advokasi kebijakan pro-kewirausahaan sosial, dan
3) serta fasilitasi kemitraan dengan pemerintah dan sektor lain.

Melalui fungsi tersebut, HIPMI tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan sebagai agen transformasi sosial yang mendukung pencapaian SDGs secara sistemik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

3. Ekosistem Kewirausahaan

a. Defenisi Ekosistem Kewirausahaan

Konsep ekosistem kewirausahaan berakar dari analogi biologi yang diperkenalkan oleh Moore (1993), yang memandang perusahaan bukan sebagai entitas tunggal, melainkan bagian dari ekosistem bisnis yang saling bergantungan. Dalam konteks modern, Mason & Brown (2014) mendefinisikan ekosistem kewirausahaan sebagai sekumpulan aktor, organisasi, dan institusi yang saling berhubungan secara formal dan informal, yang berkoordinasi untuk memfasilitasi pertumbuhan bisnis yang inovatif. Berbeda dengan pendekatan "klaster" yang

hanya berfokus pada kedekatan geografis, teori ekosistem menekankan pada interaksi dinamis dan peran budaya serta kebijakan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penciptaan nilai.

Konsep dasar kewirausahaan atau *entrepreneurship* mengacu pada kemampuan untuk mengenali dan memanfaatkan peluang bisnis, menciptakan nilai, dan mengambil risiko untuk membangun usaha yang berkelanjutan. Seorang entrepreneur tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga berinovasi untuk memberikan solusi terhadap masalah sosial dan ekonomi. Entrepreneurship mencakup keterampilan dalam mengelola sumber daya, membuat keputusan strategis, serta beradaptasi dengan perubahan pasar. Dalam konteks ini, *entrepreneurship* juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di era globalisasi yang menuntut kecepatan dan kreativitas dalam menghadapi tantangan. (Annisa, 2024).

Ekosistem kewirausahaan adalah suatu sistem atau lingkungan yang terdiri dari aktor, institusi, dan proses yang saling berinteraksi untuk menciptakan, mendukung, dan mengembangkan aktivitas kewirausahaan secara berkelanjutan. Ekosistem ini melibatkan elemen-elemen seperti wirausahawan, pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga keuangan, organisasi pendukung, serta budaya dan regulasi yang mendorong inovasi dan pertumbuhan bisnis. Ekosistem kewirausahaan merupakan konsep yang menekankan pentingnya lingkungan yang mendukung dalam proses penciptaan, pengembangan, dan keberlanjutan usaha. Berbeda dengan pendekatan klasik yang melihat kewirausahaan sebagai aktivitas individu, pendekatan ekosistem melihat kewirausahaan sebagai hasil interaksi yang kompleks antara pelaku usaha dan berbagai elemen lingkungan eksternal yang saling memengaruhi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Konsep ekosistem kewirausahaan menandai pergeseran fundamental dalam studi kewirausahaan, dari fokus yang berpusat pada sifat psikologis individu (*Individual-centric*) menuju pendekatan sistemik (*System-centric*). Menurut Stam (2015), ekosistem kewirausahaan adalah sekumpulan aktor dan faktor yang saling bergantung, yang dikelola sedemikian rupa sehingga memungkinkan

kewirausahaan produktif dalam suatu wilayah tertentu. Berbeda dengan konsep klaster industri konvensional, ekosistem lebih menekankan pada interaksi dinamis, aliran pengetahuan, dan keterhubungan antara elemen formal dan informal.

Menurut Isenberg (2010), *"An entrepreneurial ecosystem consists of a set of individual elements—such as leadership, culture, capital markets, and policy—that combine in complex ways to foster entrepreneurship."* Artinya, kewirausahaan tidak hanya tumbuh dari individu yang berjiwa bisnis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh struktur dan dinamika lingkungan di sekitarnya. Isenberg menyatakan bahwa ekosistem kewirausahaan terdiri atas berbagai elemen seperti kebijakan pemerintah, akses terhadap modal, budaya kewirausahaan, infrastruktur, sumber daya manusia, dan pasar. Elemen-elemen ini membentuk suatu sistem yang saling terkait dan memungkinkan aktivitas kewirausahaan berkembang secara berkelanjutan. Dalam hal ini, peran pemerintah, institusi pendidikan, komunitas bisnis, dan lembaga keuangan menjadi sangat krusial dalam membangun ekosistem yang kondusif.

Model yang paling banyak diadopsi dalam kebijakan publik dan riset akademik adalah *Entrepreneurship Ecosystem Strategy* dari Daniel Isenberg. Teori ekosistem juga sangat dipengaruhi oleh *Institutional Theory* (North, 1990). Ekosistem dipandang sebagai manifestasi dari aturan main yang ada di suatu wilayah. Menurut Stam (2015), ekosistem kewirausahaan bukan sekadar daftar komponen, melainkan sebuah sistem nilai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Sementara itu, Stam (2015) menyatakan bahwa *"An entrepreneurial ecosystem is a set of interdependent actors and factors coordinated in such a way that they enable productive entrepreneurship within a particular territory."* Pendekatan ini menekankan pentingnya keterkaitan dan koordinasi antara faktor-faktor internal (kapasitas pelaku usaha) dan eksternal (lingkungan pendukung) dalam suatu wilayah tertentu. Lebih lanjut, Stam (2015) menekankan bahwa produktivitas kewirausahaan sangat ditentukan oleh koordinasi dan keterkaitan antar-aktor dalam ekosistem tersebut. Ekosistem yang kuat ditandai dengan kolaborasi yang erat, ketersediaan informasi dan sumber daya, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan.

b. Determinan Ekosistem Kewirausahaan

Ekosistem kewirausahaan tidak terbentuk secara spontan, melainkan merupakan hasil dari interaksi dinamis berbagai faktor yang saling memengaruhi. Faktor-faktor ini, yang dikenal sebagai *determinan ekosistem kewirausahaan*, mencakup komponen-komponen kunci yang mendukung terbentuknya lingkungan yang kondusif bagi muncul dan berkembangnya wirausaha. Identifikasi terhadap determinan ini menjadi penting untuk merancang strategi pengembangan kewirausahaan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Dalam kerangka konseptualnya, Isenberg (2011) mengidentifikasi enam domain utama yang membentuk ekosistem kewirausahaan. Keenam domain tersebut mencakup kebijakan (*policy*), keuangan (*finance*), budaya (*culture*), dukungan institusional (*supports*), sumber daya manusia (*human capital*), dan pasar (*markets*). Domain-domain ini merupakan representasi dari ratusan elemen yang saling berinteraksi secara dinamis dalam suatu lingkungan kewirausahaan.

1) *Policy* (Kebijakan): Domain kebijakan mencakup regulasi pemerintah, insentif fiskal, serta kepemimpinan publik yang mendukung aktivitas kewirausahaan. Kebijakan yang kondusif dapat mengurangi hambatan birokrasi, menyediakan insentif pajak, dan menciptakan kerangka regulasi yang mendukung pertumbuhan usaha baru.
2) *Finance* (Pembiayaan): Pembiayaan mencakup akses terhadap berbagai sumber modal seperti *venture capital*, *angel investors*, dana awal (*seed capital*), maupun pembiayaan dari lembaga keuangan. Ketersediaan modal menjadi faktor penting dalam mendukung tahap awal pertumbuhan perusahaan rintisan (*start-up*).
3) *Culture* (Budaya Kewirausahaan): Budaya masyarakat yang menghargai inovasi, toleransi terhadap kegagalan, dan pengakuan terhadap keberhasilan wirausahawan menjadi faktor penting dalam membangun iklim kewirausahaan yang kuat. Persepsi sosial terhadap wirausahawan sangat mempengaruhi minat masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas kewirausahaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

4) *Supports* (Dukungan Infrastruktur dan Institusi): Domain ini mencakup keberadaan inkubator bisnis, pusat inovasi, lembaga pelatihan, firma hukum, konsultan bisnis, dan berbagai institusi yang menyediakan layanan pendukung bagi pengusaha. Infrastruktur ini membantu perusahaan rintisan memperoleh akses ke pengetahuan, jaringan, dan layanan profesional.
5) *Human Capital* (Modal Manusia): Modal manusia mencakup kualitas tenaga kerja, pendidikan kewirausahaan, serta ketersediaan individu yang memiliki keterampilan manajerial dan teknis. Kehadiran wirausahawan berpengalaman, mentor, dan tenaga kerja terampil menjadi faktor penting dalam memperkuat ekosistem kewirausahaan.
6) *Markets* (Pasar): Domain pasar berkaitan dengan akses perusahaan terhadap konsumen dan jaringan distribusi baik di tingkat domestik maupun global. Pasar yang terbuka memungkinkan perusahaan rintisan memperoleh pelanggan awal (*early adopters*) dan mempercepat proses komersialisasi inovasi.

Keenam pilar ini tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus saling memperkuat dalam menciptakan lingkungan yang mampu melahirkan dan memfasilitasi pelaku usaha baru.

Dalam model ekosistem kewirausahaan, Isenberg (2011) menempatkan kebijakan (*policy*) sebagai pilar fundamental yang menentukan arah dan kecepatan pertumbuhan usaha. Kebijakan tidak hanya dipahami sebagai kumpulan dokumen hukum, tetapi sebagai instrumen strategis yang menciptakan insentif atau hambatan bagi inovasi. Kebijakan yang efektif berfungsi sebagai *enabler* (penggerak) yang meminimalkan hambatan birokrasi dan risiko bagi pengusaha muda dalam mengeksekusi misi sosialnya.

Kepemimpinan institusional merujuk pada kapasitas pemimpin dalam organisasi atau pemerintahan untuk menyelaraskan kepentingan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*). Merujuk pada North (1990), kepemimpinan institusional yang kuat di dalam HIPMI berperan dalam memberikan legitimasi bagi kewirausahaan sosial. Pemimpin yang memiliki visi pro-entrepreneurship akan mampu mengarahkan sumber daya organisasi untuk melakukan advokasi kebijakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

yang memihak pada keberlanjutan, sehingga menciptakan rasa aman dan kepercayaan bagi para pelaku usaha.

Regulasi merupakan perwujudan formal dari kebijakan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan (SDGs), regulasi yang memihak mencakup:

1) Kemudahan Izin Usaha: Menyederhanakan tata kelola birokrasi bagi *startup* sosial.
2) Insentif Fiskal: Pemberian keringanan pajak bagi perusahaan yang memiliki dampak sosial nyata.
3) Standar Sertifikasi Sosial: Regulasi yang mengakui status hukum "Perusahaan Sosial" (*Social Enterprise*).

Sejalan dengan Isenberg (2011) dan North (1990), kebijakan melalui kepemimpinan institusional dan regulasi yang akomodatif bertindak sebagai katalis dalam ekosistem. Dalam model penelitian ini, sinergi kebijakan yang pro-pengusaha menjadi jembatan krusial bagi internalisasi nilai Maqasid guna memastikan pertumbuhan bisnis yang berdampak sosial dan selaras dengan SDGs.

Dalam literatur ekosistem kewirausahaan, Isenberg (2011) menegaskan bahwa keuangan (*finance*) bukan sekadar ketersediaan dana, melainkan ketersediaan spektrum modal yang beragam dan berkelanjutan. Ekosistem yang sehat harus menyediakan akses permodalan yang sesuai dengan siklus hidup bisnis, mulai dari modal benih (*seed capital*) untuk tahap awal, hingga modal ventura dan kredit perbankan untuk tahap ekspansi. Tanpa adanya kontinum pendanaan ini, inovasi sosial yang dihasilkan oleh pengusaha muda akan mengalami "lembah kematian" (*valley of death*) sebelum mencapai skala dampak yang signifikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Stam (2015) menambahkan bahwa determinan ekosistem kewirausahaan dapat dikelompokkan ke dalam dua dimensi besar: kondisi sistemik dan output kewirausahaan. Kondisi sistemik mencakup infrastruktur formal (seperti regulasi, pendidikan, dan teknologi) dan informal (seperti nilai sosial dan jaringan), sedangkan outputnya mencakup peningkatan jumlah startup, pertumbuhan skala usaha, dan dampak sosial ekonomi yang dihasilkan.

Isenberg menekankan bahwa setiap ekosistem kewirausahaan memiliki karakteristik unik yang tidak dapat direplikasi secara identik di wilayah lain. Hal

ini disebabkan oleh interaksi kompleks antara faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya dalam suatu wilayah. Oleh karena itu, strategi pengembangan kewirausahaan harus disesuaikan dengan konteks lokal dan tidak sekadar meniru model yang sukses di tempat lain seperti Silicon Valley.

Selain itu, ekosistem kewirausahaan yang matang cenderung menjadi self-sustaining system, yaitu sistem yang mampu mempertahankan keberlanjutan aktivitas kewirausahaan secara mandiri. Ketika keenam domain dalam ekosistem tersebut berkembang secara seimbang, maka interaksi antaraktor akan menciptakan siklus positif yang terus mendorong munculnya inovasi dan perusahaan baru.

Ekosistem kewirausahaan dipahami sebagai struktur sistemik yang memfasilitasi interaksi antara aktor, institusi, dan budaya untuk mendorong inovasi produktif (Stam, 2015; Isenberg, 2011). Dalam penelitian ini, ekosistem kewirausahaan sosial di HIPMI menjadi variabel krusial yang mentransformasi dukungan sumber daya menjadi aksi nyata pencapaian SDGs melalui filter nilai Maqasid Syariah.

Dalam konteks Indonesia, beberapa studi (Nasution & Pamungkas, 2020; Bappenas, 2022) mengidentifikasi bahwa faktor-faktor seperti dukungan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, akses terhadap permodalan, peran organisasi seperti HIPMI dan inkubator bisnis, serta ekosistem digital merupakan penentu penting dalam keberhasilan kewirausahaan, terutama di kalangan wirausaha muda. HIPMI sebagai organisasi kewirausahaan nasional telah memainkan peran strategis dalam memperkuat determinan ini melalui pembinaan anggota, jejaring usaha, dan advokasi kebijakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Tabel 2.5
Determinan Ekosistem Kewirausahaan

Aspek	Deskripsi
Kebijakan dan Regulasi	Insentif, kemudahan perizinan, kebijakan fiskal dan non-fiskal
Akses Permodalan	Kredit usaha, modal ventura, crowdfunding, dan akses ke lembaga keuangan
Sumber Daya Manusia	Pendidikan, pelatihan, dan keterampilan wirausaha

Aspek	Deskripsi
Infrastruktur	Akses teknologi, transportasi, coworking space, dan fasilitas produksi
Koneksi dan Jejaring	Kolaborasi antar pelaku usaha, mentoring, dan kemitraan strategis
Budaya dan Nilai Sosial	Sikap terhadap kegagalan, inovasi, serta persepsi sosial terhadap wirausaha

Dengan memahami determinan ini secara menyeluruh, berbagai pihak termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dapat berperan lebih efektif dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang inklusif dan berdaya saing tinggi.

c. Elemen Ekosistem Kewirausahaan

Ekosistem kewirausahaan terdiri dari berbagai elemen yang saling terhubung dan berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi, pertumbuhan bisnis, dan keberhasilan wirausaha. Elemen-elemen ini bukan hanya sebatas infrastruktur fisik atau kebijakan, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, dan institusional yang membentuk dinamika kewirausahaan dalam suatu wilayah atau komunitas.

Menurut World Economic Forum (2013), terdapat delapan elemen utama yang harus diperhatikan dalam membangun ekosistem kewirausahaan, yaitu:

1) Pasar; Adanya akses terhadap pasar lokal dan global yang memungkinkan wirausaha menjual produk atau jasa.
2) Akses ke Pendanaan; Ketersediaan pembiayaan dari berbagai sumber seperti bank, modal ventura, angel investor, dan crowdfunding.
3) Sumber Daya Manusia; Kualitas dan kuantitas tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan semangat kewirausahaan.
4) Kebijakan dan Regulasi Pemerintah; Peraturan yang mendorong inovasi dan kemudahan berbisnis.
5) Sistem Pendidikan dan Pelatihan; Institusi pendidikan yang mendorong kewirausahaan dan menyediakan pelatihan yang relevan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

6) Infrastruktur; Sarana dan prasarana fisik serta digital yang mendukung aktivitas usaha.
7) Budaya Kewirausahaan; Nilai, norma, dan persepsi masyarakat terhadap risiko, inovasi, dan kegagalan.
8) Dukungan dan Mentoring; Ketersediaan organisasi pendukung seperti inkubator, akselerator, asosiasi wirausaha, dan mentor bisnis.

Feld (2012) dalam bukunya *Startup Communities* juga menekankan pentingnya komunitas wirausaha yang aktif, di mana pelaku usaha saling membantu, berbagi pengetahuan, dan membentuk jejaring yang kuat. Buku ini menjelaskan bagaimana sebuah kota atau wilayah dapat membangun ekosistem startup yang berkelanjutan melalui kolaborasi aktor ekonomi, sosial, dan institusional. Feld menekankan bahwa keberhasilan komunitas startup tidak semata-mata ditentukan oleh modal finansial, tetapi oleh kekuatan jaringan komunitas wirausaha yang saling mendukung dan berkolaborasi.

Feld (2012) mendefinisikan *startup community* sebagai jaringan individu, organisasi, dan institusi yang saling berinteraksi untuk mendukung lahir dan berkembangnya perusahaan rintisan dalam suatu wilayah tertentu. Komunitas ini mencakup wirausahawan, investor, mentor, universitas, pemerintah, serta berbagai organisasi pendukung seperti inkubator dan akselerator bisnis.

Menurut Feld, komunitas startup berbeda dari program pembangunan ekonomi tradisional yang biasanya bersifat top-down dan dikendalikan oleh pemerintah atau lembaga besar. Sebaliknya, komunitas startup berkembang secara *bottom-up,* dipimpin oleh para wirausahawan yang secara aktif membangun jaringan kolaborasi dan berbagi pengetahuan dalam komunitas tersebut (Feld, 2012).

Feld mengemukakan empat prinsip utama yang menjadi fondasi pembangunan komunitas startup yang kuat, yaitu:

1. *Entrepreneur-led community*: Komunitas startup harus dipimpin oleh para wirausahawan, bukan oleh pemerintah atau institusi lain. Wirausahawan dianggap sebagai aktor utama yang memahami kebutuhan inovasi, pasar, dan dinamika startup.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

2. *Long-term commitment*: Pengembangan komunitas startup membutuhkan komitmen jangka panjang, biasanya selama 20 tahun atau lebih. Ekosistem kewirausahaan tidak dapat terbentuk secara instan karena membutuhkan waktu untuk membangun kepercayaan, jaringan, dan budaya inovasi.
3. *Inclusiveness*: Komunitas startup harus bersifat inklusif dan terbuka bagi siapa pun yang ingin berpartisipasi. Keterbukaan ini memungkinkan pertukaran ide, kolaborasi lintas sektor, dan pembentukan jaringan sosial yang luas.
4. *Continuous activities*: Komunitas startup perlu didukung oleh berbagai aktivitas yang berkelanjutan seperti pertemuan komunitas, hackathon, konferensi teknologi, mentoring, dan kegiatan networking yang mempertemukan pelaku startup secara rutin.

Dalam kerangka Feld, komunitas startup terdiri dari dua kelompok aktor utama:

1. *Leaders* (pemimpin ekosistem): Kelompok ini terdiri dari wirausahawan yang aktif membangun perusahaan dan menjadi motor penggerak komunitas startup.
2. *Feeders* (pendukung ekosistem): Kelompok ini meliputi investor, universitas, pemerintah, mentor, penyedia layanan profesional, dan perusahaan besar yang menyediakan sumber daya bagi komunitas *startup*.

Hubungan antara *leaders* dan *feeders* menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi, pertumbuhan usaha, serta transfer pengetahuan dalam komunitas kewirausahaan. Feld menekankan bahwa komunitas startup merupakan bagian dari ekosistem kewirausahaan yang lebih luas. Dalam ekosistem ini, kolaborasi antara berbagai aktor menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi, pembentukan perusahaan baru, serta pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi.

Ekosistem startup yang kuat biasanya ditandai oleh beberapa karakteristik, antara lain:

1) adanya jaringan wirausahawan yang saling terhubung
2) akses terhadap modal dan investor
3) keberadaan mentor dan komunitas pendukung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

4) keterlibatan universitas dalam inovasi dan riset
5) budaya yang menghargai kreativitas dan toleransi terhadap kegagalan.

Dengan demikian, keberhasilan komunitas startup tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh budaya kolaborasi dan pembelajaran kolektif dalam masyarakat.

Konsep startup communities yang dikembangkan Feld memberikan kontribusi penting dalam literatur kewirausahaan dan pembangunan ekonomi regional. Pendekatan ini menekankan bahwa pembangunan ekosistem kewirausahaan harus berfokus pada penguatan jaringan komunitas dan kolaborasi antaraktor, bukan sekadar pada intervensi kebijakan pemerintah atau penyediaan insentif ekonomi.

Pemikiran Feld juga menjadi dasar bagi berbagai penelitian mengenai *entrepreneurship ecosystem, innovation clusters*, dan *startup ecosystems* di berbagai negara. Pendekatan ini menunjukkan bahwa komunitas wirausaha yang kuat dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi.

Di Indonesia, elemen-elemen ini mulai terbentuk melalui peran berbagai aktor, termasuk organisasi kewirausahaan seperti Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). HIPMI memainkan peran penting dalam membangun jaringan, advokasi kebijakan, pelatihan SDM, serta membuka akses terhadap pasar dan pendanaan melalui kolaborasi dengan stakeholder strategis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Tabel 2.6
Elemen-Elemen Dalam Ekosistem Kewirausahaan

Elemen	Deskripsi
Pasar	Peluang akses ke konsumen lokal maupun internasional
Pembiayaan	Kredit usaha, venture capital, angel investor, hibah, crowdfunding
SDM dan Talenta	Tenaga kerja terampil dan wirausaha muda dengan ide kreatif
Regulasi dan Kebijakan	Insentif, kemudahan perizinan, perlindungan hukum

Elemen	Deskripsi
Pendidikan dan Pelatihan	Kurikulum kewirausahaan, pelatihan teknis dan manajerial
Infrastruktur Fisik/Digital	Internet, transportasi, coworking space, dan fasilitas produksi
Budaya Kewirausahaan	Dukungan sosial terhadap inovasi, toleransi terhadap kegagalan, semangat berkompetisi
Dukungan Eksternal	Inkubator, akselerator, mentor, asosiasi bisnis, dan media kewirausahaan

Keberhasilan membangun ekosistem kewirausahaan sangat tergantung pada sinergi dari seluruh elemen ini. Tidak ada satu elemen yang bisa bekerja sendiri; semuanya harus terintegrasi dan saling mendukung untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan wirausaha berkembang dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial.

d. Ekosistem Kewirausahaan dan Pertumbuhan Ekonomi

Ekosistem kewirausahaan memainkan peran krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Berbagai studi menunjukkan bahwa lingkungan kewirausahaan yang sehat mampu meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan mengurangi kesenjangan sosial. Dalam konteks ini, kewirausahaan tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi individual, melainkan sebagai pendorong transformasi struktural dalam suatu perekonomian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Menurut Acs, Szerb, & Autio (2014), keterkaitan antara ekosistem kewirausahaan dan pertumbuhan ekonomi terletak pada kemampuannya dalam menciptakan perusahaan-perusahaan inovatif yang dapat meningkatkan efisiensi pasar dan membuka peluang baru. Ekosistem yang kondusif mendorong pengusaha untuk berani mengambil risiko, mempercepat proses adopsi teknologi, dan menciptakan produk atau layanan baru yang memiliki nilai tambah tinggi.

World Bank (2020) menegaskan bahwa negara-negara dengan ekosistem kewirausahaan yang matang cenderung memiliki struktur ekonomi yang lebih dinamis dan lebih resilien terhadap krisis. Kewirausahaan juga berkontribusi

terhadap peningkatan pendapatan per kapita, pengurangan pengangguran, dan penyebaran pembangunan ke daerah-daerah tertinggal.

Pendekatan ekosistem kewirausahaan memiliki implikasi penting bagi perumusan kebijakan pembangunan ekonomi. Alih-alih hanya fokus pada intervensi pemerintah atau penyediaan modal, strategi ini menekankan pentingnya membangun interaksi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan kewirausahaan tidak hanya bertujuan menciptakan perusahaan baru, tetapi juga membangun lingkungan yang memungkinkan kewirausahaan berkembang secara berkelanjutan.

Melalui kerangka ini, Isenberg menekankan bahwa keberhasilan pembangunan kewirausahaan tidak ditentukan oleh satu faktor tunggal, tetapi oleh sinergi antara berbagai elemen dalam ekosistem yang saling memperkuat. Oleh karena itu, strategi pembangunan ekonomi yang efektif harus mempertimbangkan dinamika ekosistem secara keseluruhan.

Di Indonesia, penguatan ekosistem kewirausahaan menjadi salah satu strategi pembangunan ekonomi nasional, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pemerintah, melalui sinergi dengan sektor swasta dan organisasi seperti HIPMI, berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan UMKM dan startup berbasis inovasi. HIPMI sendiri aktif dalam memfasilitasi pelatihan, akses permodalan, jejaring bisnis, serta advokasi kebijakan, yang semuanya secara tidak langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Tabel 2.7
Cara Ekosistem Kewirausahaan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

Aspek Ekosistem	Dampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Akses Permodalan	Memungkinkan ekspansi usaha dan investasi baru
Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatkan kualitas SDM dan produktivitas kerja
Regulasi dan Kebijakan	Memberikan kepastian hukum dan mendorong iklim investasi
Jaringan dan Kolaborasi	Mendorong transfer pengetahuan dan inovasi

Aspek Ekosistem	Dampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Inovasi dan Teknologi	Meningkatkan daya saing produk dan efisiensi produksi
Budaya Wirausaha	Mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran

Dari berbagai perspektif, jelas bahwa ekosistem kewirausahaan tidak hanya penting untuk mendukung pelaku usaha, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional. Teori ekosistem memberikan kerangka kerja untuk memahami bahwa kontribusi pengusaha HIPMI terhadap pembangunan berkelanjutan tidak terjadi dalam ruang hampa. Model ISEEM memposisikan ekosistem kewirausahaan sosial sebagai variabel mediasi yang menyatukan faktor input material dengan poros nilai spiritual, menciptakan sebuah sistem yang holistik untuk mencapai kemaslahatan publik

4. Kewirausahaan Sosial

a. Defenisi Kewirausahaan Sosial

Kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) merupakan konsep yang semakin berkembang dalam kajian kewirausahaan modern karena kemampuannya mengintegrasikan tujuan ekonomi dan sosial dalam satu kerangka kegiatan usaha. Kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) adalah bentuk kewirausahaan yang menggabungkan tujuan sosial dengan pendekatan bisnis yang inovatif dan berkelanjutan. Berbeda dengan kewirausahaan konvensional yang berfokus pada pencapaian keuntungan ekonomi, kewirausahaan sosial mengedepankan pencapaian dampak sosial yang positif sebagai tujuan utama, sambil tetap menjaga keberlanjutan finansial organisasi.

Konsep kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) berkembang pesat dalam literatur manajemen dan kewirausahaan sebagai pendekatan inovatif dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial. Salah satu kontribusi penting dalam pengembangan konsep ini diberikan oleh Johanna Mair dan Ignasi Martí melalui artikel mereka yang berjudul *Social Entrepreneurship Research: A Source of*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

Explanation, Prediction, and Delight yang diterbitkan dalam *Journal of World Business* pada tahun 2006.

Mair dan Martí memandang kewirausahaan sosial sebagai suatu proses penciptaan nilai yang dilakukan melalui kombinasi sumber daya secara inovatif untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan peluang yang bertujuan menciptakan perubahan sosial atau memenuhi kebutuhan sosial yang belum terpenuhi. Dengan kata lain, kewirausahaan sosial tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada penciptaan nilai sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Menurut Mair dan Martí (2006), kewirausahaan sosial dapat dipahami sebagai sebuah proses dinamis yang melibatkan identifikasi peluang, mobilisasi sumber daya, serta inovasi dalam menciptakan solusi terhadap permasalahan sosial. Proses ini dapat dilakukan melalui pembentukan organisasi baru, pengembangan model bisnis inovatif, maupun transformasi organisasi yang sudah ada. Dengan demikian, kewirausahaan sosial tidak terbatas pada sektor nirlaba, tetapi juga dapat terjadi dalam organisasi bisnis maupun sektor publik yang memiliki misi sosial.

Dalam perspektif mereka, kewirausahaan sosial memiliki dua karakteristik utama, yaitu orientasi pada penciptaan nilai sosial dan penggunaan pendekatan kewirausahaan yang inovatif. Berbeda dengan kewirausahaan konvensional yang berfokus pada penciptaan nilai ekonomi, kewirausahaan sosial menempatkan misi sosial sebagai tujuan utama, sementara nilai ekonomi berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keberlanjutan organisasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Lebih lanjut, Mair dan Martí juga menekankan bahwa kewirausahaan sosial sering muncul dalam konteks kegagalan pasar (*market failure*) atau kekosongan institusional (*institutional voids*), yaitu situasi ketika mekanisme pasar atau kebijakan pemerintah tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara memadai. Dalam kondisi tersebut, wirausahawan sosial bertindak sebagai agen perubahan (*change agents*) yang menciptakan solusi inovatif untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan sosial.

Selain itu, penelitian Mair dan Martí menunjukkan bahwa kewirausahaan sosial merupakan bidang penelitian multidisipliner yang menggabungkan berbagai

perspektif ilmu, seperti kewirausahaan, manajemen, sosiologi, dan ilmu kebijakan publik. Oleh karena itu, studi tentang kewirausahaan sosial tidak hanya menyoroti karakteristik individu wirausahawan sosial, tetapi juga proses, organisasi, serta konteks institusional yang mempengaruhi keberhasilan inisiatif sosial.

Dalam perkembangannya, konsep kewirausahaan sosial semakin mendapat perhatian karena dianggap mampu memberikan solusi inovatif terhadap berbagai tantangan pembangunan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, kegiatan kewirausahaan tidak hanya menciptakan keuntungan ekonomi, tetapi juga menghasilkan dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat. Dengan demikian, kewirausahaan sosial menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pembangunan inklusif dan berkelanjutan di berbagai negara.

Tokoh lain yang memberikan kontribusi penting dalam pengembangan konsep ini adalah J. Gregory Dees melalui tulisannya yang berjudul *The Meaning of Social Entrepreneurship* pada tahun 2001. Dees dianggap sebagai salah satu pelopor yang memberikan definisi konseptual yang sistematis mengenai kewirausahaan sosial dan peran wirausahawan sosial dalam menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan.

Menurut Dees (2001), kewirausahaan sosial merupakan proses penerapan prinsip-prinsip kewirausahaan untuk menciptakan dan mengelola organisasi yang bertujuan menghasilkan nilai sosial bagi masyarakat. Dalam pandangan ini, wirausahawan sosial berperan sebagai agen perubahan (*change agents*) yang berkomitmen untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial melalui pendekatan inovatif, berkelanjutan, dan berorientasi pada dampak sosial. Dengan demikian, kewirausahaan sosial tidak hanya berfokus pada penciptaan keuntungan ekonomi, tetapi juga pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki kondisi sosial yang ada (Dees, 2001).

Dees menjelaskan bahwa kewirausahaan sosial memiliki karakteristik yang membedakannya dari kewirausahaan konvensional. Wirausahawan sosial tidak hanya mencari peluang pasar, tetapi juga mengidentifikasi peluang untuk menciptakan perubahan sosial yang signifikan. Dalam hal ini, tujuan utama dari aktivitas kewirausahaan sosial adalah penciptaan nilai sosial (*social value creation*),

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

sementara keuntungan ekonomi lebih berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keberlanjutan organisasi. Oleh karena itu, keberhasilan kewirausahaan sosial tidak semata-mata diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari dampak sosial yang dihasilkan bagi masyarakat (Dees, 2001).

Dees (2001), yang dikenal sebagai salah satu tokoh terkemuka dalam bidang ini, mendefinisikan kewirausahaan sosial sebagai individu yang memainkan peran sebagai agen perubahan dalam sektor sosial dengan: (1) mengadopsi misi untuk menciptakan nilai sosial, (2) mencari peluang baru untuk misi tersebut, (3) melibatkan proses inovasi dan adaptasi berkelanjutan, dan (4) menunjukkan akuntabilitas terhadap hasil yang dicapai.

Lebih lanjut, Dees (2001) mengidentifikasi beberapa karakteristik utama yang dimiliki oleh wirausahawan sosial. Pertama, mereka memiliki misi sosial yang jelas sebagai tujuan utama organisasi. Kedua, mereka secara aktif mencari dan memanfaatkan peluang baru untuk menciptakan perubahan sosial. Ketiga, mereka menerapkan inovasi secara berkelanjutan dalam mengembangkan solusi terhadap masalah sosial. Keempat, mereka berani mengambil risiko dan bertindak proaktif meskipun memiliki keterbatasan sumber daya. Kelima, mereka memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi terhadap masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait.

Selain itu, Dees juga menekankan bahwa kewirausahaan sosial sering muncul dalam situasi di mana mekanisme pasar maupun kebijakan pemerintah belum mampu menyelesaikan permasalahan sosial secara efektif. Dalam kondisi tersebut, wirausahawan sosial hadir sebagai inovator yang mengembangkan pendekatan baru dalam menyediakan layanan sosial, meningkatkan akses terhadap sumber daya, serta menciptakan model organisasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, kewirausahaan sosial berperan penting dalam melengkapi peran sektor publik dan sektor swasta dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

Dalam perkembangan literatur kewirausahaan, konsep yang dikemukakan oleh Dees menjadi salah satu landasan teoritis yang banyak digunakan dalam penelitian mengenai kewirausahaan sosial. Kerangka konseptual ini memberikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

pemahaman bahwa kewirausahaan sosial tidak hanya merupakan aktivitas bisnis dengan tujuan sosial, tetapi juga merupakan gerakan transformasi sosial yang memanfaatkan kreativitas, inovasi, dan kepemimpinan untuk menciptakan perubahan yang lebih luas dalam masyarakat.

Menurut Martin & Osberg (2007), kewirausahaan sosial adalah penciptaan solusi inovatif untuk masalah sosial yang belum dapat ditangani oleh sektor lain. Sementara itu, Ashoka (organisasi global pelopor kewirausahaan sosial) menggambarkan kewirausahaan sosial sebagai penggunaan strategi wirausaha oleh individu atau kelompok untuk mengembangkan solusi inovatif dan berkelanjutan terhadap masalah sosial yang kompleks. Pendekatan ini melibatkan penggabungan antara visi kewirausahaan, efisiensi operasional, dan tujuan kebermanfaatan sosial dalam satu kerangka model bisnis. Menurut Peraturan Pemerintah Indonesia, kewirausahaan sosial adalah kegiatan usaha yang bertujuan menyelesaikan masalah sosial dan memberikan dampak positif masyarakat.

Kewirausahaan sosial juga dipandang sebagai alternatif dalam menjembatani kesenjangan antara sektor publik yang terbatas dalam jangkauan layanan sosial, dan sektor privat yang cenderung fokus pada keuntungan. Oleh karena itu, wirausahawan sosial menjadi aktor penting dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam hal pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, praktik kewirausahaan sosial mulai tumbuh melalui berbagai inisiatif komunitas, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi seperti HIPMI yang mendorong generasi muda untuk menciptakan usaha yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

b. Tujuan dan Karakteristik Kewirausahaan Sosial

Kewirausahaan sosial memiliki orientasi ganda, yaitu mengejar keberlanjutan finansial sekaligus menciptakan dampak sosial yang signifikan. Tujuan utama dari kewirausahaan sosial adalah menyelesaikan permasalahan sosial, memberdayakan masyarakat, serta menciptakan inovasi yang berkelanjutan

untuk peningkatan kesejahteraan publik. Beberapa tujuan utama kewirausahaan sosial antara lain:

1. Menciptakan Solusi untuk Masalah Sosial: Kewirausahaan sosial berfokus pada penciptaan solusi inovatif terhadap masalah-masalah seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan, dan lingkungan.
2. Memberdayakan Komunitas: Memberikan peluang kepada kelompok marginal agar dapat mandiri secara ekonomi dan sosial.
3. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan: Mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* melalui pendekatan usaha yang tidak merusak lingkungan dan memperhatikan nilai-nilai keadilan sosial.
4. Membangun Sistem Sosial yang Inklusif: Mendorong keterlibatan berbagai aktor (pemerintah, sektor swasta, masyarakat) dalam kolaborasi multisektor yang menguntungkan bersama.
5. Meningkatkan Inovasi Sosial: Mengembangkan ide-ide baru yang lebih efektif dan efisien dalam memecahkan masalah sosial dibanding pendekatan tradisional.

Berbeda dengan bisnis komersial konvensional, kewirausahaan sosial memiliki karakteristik khas yang menekankan nilai sosial sebagai inti operasionalnya. Beberapa karakteristik utama kewirausahaan sosial meliputi:

Tabel 2.8
Karakteristik Kewirausahaan Sosial

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Karakteristik	Deskripsi
Misi Sosial yang Kuat	Tujuan utama adalah memberikan dampak sosial, bukan hanya mengejar keuntungan.
Inovatif	Mengembangkan solusi baru yang efektif dan efisien untuk mengatasi masalah sosial.
Berbasis Nilai dan Etika	Menjunjung tinggi keadilan, inklusivitas, dan tanggung jawab sosial.
Berorientasi pada Dampak	Mengukur keberhasilan berdasarkan perubahan sosial yang dihasilkan.
Keberlanjutan Finansial	Memiliki model bisnis yang memungkinkan organisasi bertahan secara mandiri.

Karakteristik	Deskripsi
Kolaboratif	Membangun kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.

Menurut Zahra et al. (2009), kewirausahaan sosial juga ditandai dengan tingginya komitmen terhadap pencapaian tujuan jangka panjang yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan, serta fleksibilitas dalam merespons perubahan dinamika sosial.

c. Peran Kewirausahaan Sosial dalam Mendukung SDGs

Kewirausahaan sosial berperan strategis dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) karena mampu menjembatani peran negara dan pasar dalam menyelesaikan masalah sosial secara inovatif, inklusif, dan berkelanjutan. SDGs terdiri dari 17 tujuan global yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengatasi berbagai tantangan utama umat manusia, mulai dari kemiskinan, kelaparan, ketimpangan, hingga perubahan iklim.

Kewirausahaan sosial mendukung SDGs melalui pendekatan bottom-up, dengan melibatkan komunitas lokal secara langsung dalam identifikasi masalah dan penciptaan solusi. Pelaku usaha sosial seringkali menciptakan model bisnis yang menjawab kebutuhan sosial seperti pendidikan, kesehatan, energi bersih, dan inklusi keuangan—sekaligus tetap menjaga prinsip keberlanjutan ekonomi.

Menurut Nicholls (2006), kewirausahaan sosial memiliki kekuatan untuk mengubah sistem karena dapat beroperasi lintas sektor, menggandeng pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan institusi donor dalam satu kerangka kerja kolaboratif. Pendekatan ini sangat sesuai dengan prinsip SDGs yang mendorong kemitraan global dan pembangunan berkelanjutan berbasis keadilan sosial.

Di Indonesia, peran kewirausahaan sosial dalam mendukung SDGs semakin terlihat melalui gerakan komunitas, platform digital, dan inisiatif dari organisasi seperti HIPMI yang mendorong wirausaha muda menciptakan dampak sosial yang terukur. Banyak pelaku kewirausahaan sosial yang fokus pada SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 8 (Pekerjaan Layak dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

Pertumbuhan Ekonomi), serta SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab).

Tabel 2.9
Kontribusi Kewirausahaan Sosial terhadap SDGs

Tujuan SDGs	Contoh Kontribusi Kewirausahaan Sosial
SDG 1: Tanpa Kemiskinan	Pemberdayaan ekonomi melalui koperasi, UMKM berbasis komunitas, dan akses pembiayaan mikro
SDG 4: Pendidikan	Platform belajar daring untuk anak di daerah tertinggal atau komunitas adat
SDG 5: Kesetaraan Gender	Usaha yang mempekerjakan ibu rumah tangga atau perempuan kepala keluarga
SDG 7: Energi Bersih	Bisnis sosial penyedia panel surya atau energi alternatif di desa terpencil
SDG 8: Pekerjaan Layak	Inklusi tenaga kerja muda dan penyandang disabilitas ke dalam dunia kerja produktif
SDG 12: Konsumsi & Produksi Bertanggung Jawab	Usaha daur ulang sampah atau pemanfaatan limbah pertanian menjadi produk bernilai tambah

Dengan karakter yang adaptif dan berbasis komunitas, kewirausahaan sosial menjadi salah satu pilar penting dalam pencapaian Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan.

d. Jenis-Jenis Kewirausahaan Sosial

Kewirausahaan sosial merupakan pendekatan inovatif dalam memecahkan persoalan sosial melalui mekanisme kewirausahaan. Berbeda dengan kewirausahaan konvensional yang berorientasi pada profit semata, kewirausahaan sosial menggabungkan orientasi sosial dan keberlanjutan finansial. Dalam praktiknya, kewirausahaan sosial memiliki variasi bentuk dan model, yang mencerminkan keragaman konteks sosial dan strategi bisnis yang digunakan. Variasi bentuk kewirausahaan sosial mencerminkan upaya adaptif dalam merespons berbagai permasalahan sosial melalui inovasi kelembagaan dan model bisnis (Dees,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

1998; Mair & Martí, 2006). Jenis-jenis kewirausahaan sosial bisa dikategorikan berdasarkan pendekatan, model bisnis, dan tujuan sosial yang ingin dicapai.

Berikut ini adalah beberapa jenis kewirausahaan sosial yang umum ditemui:

1) Non-Profit dengan Pendekatan Kewirausahaan (*Entrepreneurial Non-Profit*); Model ini beroperasi sebagai lembaga non-profit namun menjalankan aktivitas ekonomi untuk menopang keberlanjutan finansial, seperti penjualan produk atau jasa. Keuntungan digunakan kembali untuk program sosial. Fokus utamanya adalah misi sosial, sementara aktivitas bisnis berfungsi sebagai sumber pembiayaan. Contohnya adalah Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC) mengembangkan berbagai unit usaha (seperti agribisnis dan pendidikan) untuk mendukung program pengentasan kemiskinan. Model ini menunjukkan bahwa organisasi sosial dapat menjadi lebih mandiri secara finansial tanpa bergantung sepenuhnya pada donasi (Yunus et al., 2010).
2) *For-Profit* dengan Misi Sosial (*Social Purpose Business*); Perusahaan yang memiliki tujuan sosial sebagai bagian dari model bisnis utamanya, namun tetap menghasilkan keuntungan bagi pemilik modal. Misi sosial menjadi indikator utama keberhasilan, sejajar dengan performa keuangan. Contoh: perusahaan yang merekrut tenaga kerja dari kelompok marjinal.
3) *Hybrid Model* (Perpaduan Sosial dan Komersial); Jenis ini menggabungkan elemen non-profit dan for-profit dalam satu entitas atau kemitraan. Organisasi ini mungkin memiliki unit bisnis komersial yang keuntungannya digunakan untuk mendukung aktivitas sosial. Contoh nyata adalah TOMS Shoes dengan konsep *one for one*, di mana setiap pembelian produk akan disertai dengan donasi produk kepada masyarakat yang membutuhkan. Model ini mencerminkan integrasi antara logika pasar dan misi sosial secara simultan.
4) *Community-Based Enterprise* (Kewirausahaan Berbasis Komunitas); Fokus pada pemberdayaan dan kepemilikan oleh komunitas lokal. Biasanya lahir dari kebutuhan lokal dan bertujuan untuk membangun kapasitas ekonomi dan sosial komunitas tersebut. Kegiatan ekonomi digerakkan oleh dan untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

kepentingan masyarakat setempat. Contohnya adalah usaha desa wisata atau kelompok usaha bersama yang memberdayakan masyarakat lokal melalui kegiatan ekonomi berbasis potensi daerah. Model ini sangat relevan dalam konteks pembangunan inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

5) *Social Innovation Platform*; Organisasi yang bertindak sebagai fasilitator inovasi sosial, seperti inkubator kewirausahaan sosial, platform digital untuk pendanaan sosial (*crowdfunding*), atau lembaga riset dan kebijakan publik yang berfokus pada solusi sosial berbasis kewirausahaan. Contohnya adalah Ashoka, yang mendukung para *social entrepreneurs* dalam mengembangkan inovasi sosial di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Model ini menekankan peran inovasi sebagai penggerak perubahan sosial (Mair & Marti, 2006).

Tabel 2.10
Perbandingan Jenis-Jenis Kewirausahaan Sosial

Jenis Kewirausahaan Sosial	Fokus Utama	Contoh	Ciri Khas
Berbasis Komunitas	Pemberdayaan masyarakat lokal	Koperasi desa, kelompok usaha tani	Dikelola oleh komunitas, hasil usaha kembali ke masyarakat
Berbasis Produk/Jasa Sosial	Menyediakan solusi terhadap masalah sosial nyata	Air bersih murah, layanan kesehatan murah	Produk/jasa untuk kebutuhan dasar, harga terjangkau
Berbasis Pendanaan Inklusif	Akses keuangan untuk kelompok marginal	Lembaga microfinance, koperasi simpan pinjam	Fokus pada inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi
Berbasis Teknologi	Menggunakan teknologi untuk menyelesaikan isu sosial	Aplikasi pendidikan, platform bantuan sosial digital	Inovasi digital sebagai alat utama dampak sosial
Model *Hybrid* (Sosial-Komersial)	Kombinasi misi sosial dan	Perusahaan yang donasi profit ke program sosial	Bisnis berkelanjutan dengan misi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

Jenis Kewirausahaan Sosial	Fokus Utama	Contoh	Ciri Khas
	keuntungan finansial		sosial sebagai fondasi
Berbasis Advokasi	Perubahan sistem dan kebijakan sosial	Usaha yang mendukung kampanye lingkungan atau kesetaraan gender	Berorientasi pada perubahan kebijakan dan kesadaran sosial

Berbagai jenis kewirausahaan sosial tersebut menunjukkan bahwa pendekatan ini bersifat fleksibel dan kontekstual. Tidak ada satu model yang paling unggul, melainkan efektivitasnya tergantung pada:

1) karakteristik masalah sosial,
2) kapasitas pelaku usaha,
3) serta dukungan ekosistem yang tersedia.

Kewirausahaan sosial merupakan spektrum yang luas dan fleksibel. Berbagai jenis model tersebut menunjukkan bahwa kewirausahaan sosial tidak bersifat tunggal, melainkan berkembang sesuai dengan tantangan sosial dan peluang bisnis yang ada. Keberagaman ini juga mencerminkan bahwa solusi terhadap isu-isu pembangunan berkelanjutan dapat disesuaikan dengan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

5. Integrasi Maqashid Syariah dengan Kewirausahaan Sosial dan SDGs

Secara historis, Maqasid Syariah didefinisikan sebagai tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam menetapkan hukum-Nya demi kemaslahatan hamba. Konsep klasik yang dirumuskan oleh Imam Al-Shatibi berfokus pada perlindungan terhadap lima unsur pokok (*Al-Daruriyat al-Khamsah*): perlindungan agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*). Namun, dalam riset ini, Maqasid tidak lagi dipandang secara statis sebagai batasan hukum, melainkan sebagai tujuan pembangunan manusia yang bersifat proaktif.

Maqasid Syariah berasal dari kata *maqasid* (tujuan) dan *syariah* (hukum Islam), yang berarti tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariah (hukum Islam) dalam menjaga dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Menurut Al-Ghazali dan Al-Shatibi, Maqasid Syariah adalah upaya untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan (manfaat) serta menolak *mafsadah* (kerusakan). Maqasid Syariah diklasifikasikan oleh para ulama klasik seperti Al-Ghazali dan Al-Shatibi ke dalam lima kategori utama (*al-daruriyyat al-khamsah*): menjaga agama (*Hifz al-Din*), jiwa (*Hifz al-Nafs*), akal (*Hifz al-ʻAql*), keturunan (*Hifz al-Nasl*), dan harta (*Hifz al-Mal*). (Al-Shatibi).

Menurut Jasser Auda (2008), Maqasid Syariah tidak hanya dipahami sebagai perlindungan lima kebutuhan dasar (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), tetapi juga sebagai sistem nilai yang bersifat dinamis, multidimensional, dan berorientasi pada pembangunan manusia secara holistik. Auda menekankan pendekatan *systems approach* dalam memahami maqāṣid, sehingga hukum Islam dapat relevan dengan konteks modern, termasuk dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Dengan demikian, maqāṣid al-sharīʻah merupakan kerangka normatif yang tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga berfungsi sebagai paradigma pembangunan yang menekankan kesejahteraan manusia secara menyeluruh.

Tabel di bawah ini akan menampilkan lima pokok utama dalam Maqasid Syariah yang wajib dilindungi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Tabel 2.11
Maqasid Syariah

No.	Maqasid	Penjelasan
1	*Hifz al-Din* (Agama)	Menjaga agama agar tetap terjaga dan tidak hilang; mencakup kebebasan beragama dan praktik ibadah.
2	*Hifz al-Nafs* (Jiwa)	Menjaga kehidupan manusia, termasuk hak atas keamanan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan.
3	*Hifz al-ʻAql* (Akal)	Menjaga akal dari hal-hal yang merusaknya, seperti narkoba, kebodohan; mendorong pendidikan dan ilmu.

No.	Maqasid	Penjelasan
4	*Hifz al-Nasl* (Keturunan)	Menjaga keturunan dan keluarga melalui pernikahan yang sah, serta menjaga kehormatan dan hak anak.
5	*Hifz al-Mal* (Harta)	Menjaga harta benda dari perampasan, pencurian, riba; termasuk keadilan ekonomi dan hak milik pribadi.

Secara klasik, maqasid al-syariah diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan kebutuhan:

1) ***Ḍarūriyyāt (Kebutuhan Primer)*:** Merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia, meliputi:
   a) *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama),
   b) *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa),
   c) *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal),
   d) *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan),
   e) *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta).
2) ***Ḥājiyyāt (Kebutuhan Sekunder)*:** Kebutuhan yang bertujuan untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia, seperti kemudahan dalam transaksi ekonomi dan akses terhadap layanan sosial.
3) ***Taḥsīniyyāt (Kebutuhan Tersier)*:** Kebutuhan yang berkaitan dengan penyempurnaan moral, etika, dan kualitas hidup, seperti keindahan, kebersihan, dan nilai-nilai etis dalam interaksi sosial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Dalam perspektif Jasser Auda (2008), klasifikasi ini perlu diperluas dengan memasukkan dimensi seperti: keadilan sosial, hak asasi manusia, dan serta pembangunan berkelanjutan, sehingga maqāṣid menjadi lebih relevan dengan tantangan global kontemporer.

Chapra (2000) dan Kamali (2008) menekankan bahwa maqasid syariah harus menjadi landasan dalam sistem ekonomi Islam, dan ini dapat terwujud melalui model bisnis sosial yang menjamin pemerataan kesejahteraan dan keadilan ekonomi. Pemikir kontemporer seperti Jasser Auda (2008) mengembangkan kerangka ini ke dalam pendekatan sistemik, menekankan bahwa maqasid tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat dijadikan dasar untuk pengambilan

kebijakan dan inovasi sosial. Maqasid Syariah merupakan konsep kunci dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan utama dari syariah, yakni untuk mencapai kemaslahatan (maslahah) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia. Dalam konteks kontemporer, pendekatan maqasid semakin relevan ketika dikaitkan dengan isu pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan kewirausahaan sosial, yang menekankan pada keseimbangan antara nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pendekatan *systems* yang dikembangkan oleh Jasser Auda menekankan bahwa maqāṣid harus diimplementasikan secara:

1) holistik (*wholeness*), yaitu mencakup berbagai aspek kehidupan,
2) terbuka (*openness*), yaitu adaptif terhadap perubahan zaman,
3) berorientasi tujuan (*purposefulness*), yaitu fokus pada kemaslahatan,
4) multidimensional yang bermakna tidak hanya aspek hukum, tetapi juga sosial dan ekonomi.

Implementasi maqasid yang dikembangkan oleh Jasser Auda dapat dicontohkan sebagai berikut:

1) Perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*): Pengembangan sistem keuangan inklusif dan bebas riba, seperti pembiayaan mikro syariah untuk UMKM.
2) Perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*): Program kesehatan masyarakat, sanitasi, dan akses air bersih.
3) Perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*): Investasi dalam pendidikan dan inovasi.
4) Keadilan sosial: Distribusi kekayaan yang lebih merata melalui zakat, wakaf, dan filantropi Islam.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa maqāṣid tidak hanya terbatas pada aspek normatif, tetapi juga dapat diterapkan dalam kebijakan publik dan aktivitas ekonomi modern.

Maqashid Syariah merupakan tujuan-tujuan utama dari syariat Islam yang bertujuan untuk menjaga dan mengembangkan lima aspek utama kehidupan manusia: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Dalam konteks modern, nilai-nilai maqashid syariah sangat relevan untuk dijadikan kerangka etis dalam pembangunan ekonomi, termasuk dalam praktik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial memiliki keselarasan yang kuat dengan maqāṣid al-sharī‘ah, karena keduanya berorientasi pada pencapaian kemaslahatan sosial.

Kewirausahaan sosial hadir sebagai bentuk inovasi dalam dunia bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga dampak sosial yang positif dan berkelanjutan. Wirausaha sosial memadukan orientasi sosial dengan efisiensi dan kreativitas khas dunia bisnis. Ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah, yang menekankan kemaslahatan (manfaat) bagi umat manusia. Kewirausahaan sosial adalah bentuk kewirausahaan yang berfokus pada penciptaan nilai sosial berkelanjutan.

Tujuan utama dari wirausaha sosial selaras dengan prinsip maqasid, terutama dalam aspek perlindungan jiwa, akal, dan harta (Dusuki & Bouheraoua, 2011). Dalam konteks ini, wirausaha sosial dianggap sebagai agen perubahan (*change agents*) yang tidak hanya mencari keuntungan finansial, tetapi juga memperjuangkan keadilan sosial, inklusi ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam ekonomi dan kewirausahaan, prinsip *hifz al-mal* dan *hifz al-nafs* serta *hifz al-’aql* menjadi landasan untuk bisnis etis dan inklusif. *Hifẓ al-māl* tercermin dalam penciptaan usaha yang berkelanjutan, *ḥifẓ al-nafs* melalui penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan, *ḥifẓ al-‘aql* melalui inovasi dan pendidikan, dan keadilan sosial melalui inklusi ekonomi.

Kewirausahaan sosial menjadi instrumen implementatif maqāṣid dalam bidang ekonomi, karena mampu:

1) mengurangi kemiskinan,
2) meningkatkan akses terhadap sumber daya,
3) serta menciptakan nilai sosial melalui mekanisme bisnis.

Secara konseptual, *maqāṣid al-sharī‘ah* memiliki kesesuaian yang signifikan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang diinisiasi oleh United Nations. *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah agenda global yang terdiri dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tujuan-tujuan ini seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, pertumbuhan ekonomi inklusif, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

keadilan sosial, sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah. Dalam pembangunan berkelanjutan (SDGs), maqasid syariah beririsan kuat dengan tujuan keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan umat. Prinsip-prinsip maqasid sangat kompatibel dengan tujuan SDGs, seperti pengentasan kemiskinan, akses pendidikan dan kesehatan, kesetaraan gender, pekerjaan layak, serta pembangunan berkelanjutan. Misalnya:

a. *Hifz al-Nafs* mendukung SDG 3 (Kesehatan dan Kesejahteraan).
b. *Hifz al-'Aql* mendukung SDG 4 (Pendidikan Berkualitas).
c. *Hifz al-Mal* mendukung SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi).

Model penelitian ini mengadopsi pemikiran Jasser Auda (2008) yang mentransformasi Maqasid menjadi sebuah pendekatan sistem yang dinamis. Auda berargumen bahwa Maqasid Syariah harus dipahami melalui fitur-fitur sistemik seperti:

a. Kognisi (*Cognition*): Melibatkan pemahaman intelektual pengusaha terhadap nilai-nilai ketuhanan dalam bisnis.
b. Keutuhan (*Wholeness*): Melihat keterkaitan antara aspek privat (bisnis) dan publik (sosial).
c. Keterbukaan (*Openness*): Maqasid bersifat adaptif terhadap tantangan zaman, termasuk isu-isu pembangunan berkelanjutan global (SDGs).

Dalam konteks ini, Maqasid Syariah berfungsi sebagai poros etika yang membimbing keputusan bisnis anggota HIPMI agar selaras dengan kemaslahatan (*Maslahah*).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Maqasid menyediakan kerangka etis dan normatif bagi pengusaha Muslim untuk terlibat aktif dalam pencapaian SDGs melalui kewirausahaan sosial yang berbasis nilai. Kajian literatur menunjukkan bahwa Maqasid Syariah dapat menjadi kerangka konseptual yang kuat dalam pengembangan model kewirausahaan sosial berbasis Islam. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat dimensi spiritual dan etis dalam wirausaha, tetapi juga memperkuat peran HIPMI dan aktor Muslim dalam kontribusi nyata terhadap agenda pembangunan global.

Dalam struktur riset ini, Maqasid Syariah diposisikan sebagai variabel yang memediasi hubungan antara Ekosistem Kewirausahaan (Y1) dan Capaian SDGs (Y2). Hal ini didasarkan pada argumen bahwa ekosistem material (seperti akses modal dan kebijakan) tidak akan menghasilkan dampak sosial yang maksimal tanpa adanya filter nilai. Maqasid memastikan bahwa akumulasi harta (*hifdz al-mal*) tidak berhenti pada kepentingan individu, melainkan didistribusikan untuk perlindungan jiwa (*an-nafs*) dan akal (*al-aql*) melalui inovasi sosial.

Maqasid Syariah adalah "jembatan" bagi pengusaha Muslim untuk berkontribusi pada agenda global. Pendekatan sistem Jasser Auda memungkinkan adanya dialektika antara teks keagamaan dan realitas sosial. Dengan demikian, kontribusi terhadap SDGs dipandang sebagai bentuk ibadah muamalah yang nyata, di mana setiap pencapaian target SDGs (seperti pengentasan kemiskinan atau pendidikan berkualitas) secara otomatis merupakan implementasi dari tujuan Syariah.

Integrasi antara Maqashid Syariah, kewirausahaan sosial, dan SDGs dapat dilihat dari beberapa keselarasan berikut:

Tabel 2.12
Integrasi antara Maqashid Syariah, Kewirausahaan Sosial, dan SDGs

No.	Aspek Maqasid Syariah	Tujuan Syariah	Implikasi dalam Kewirausahaan Sosial	Relevansi dengan SDGs
1	Agama	*Hifz al-Din*	Menanamkan nilai etika dan integritas dalam bisnis	SDG 16 – Perdamaian, keadilan, dan institusi kuat
2	Jiwa	*Hifz al-Nafs*	Memberikan perlindungan kerja, jaminan keselamatan, dan kesejahteraan sosial	SDG 1 – Tanpa kemiskinan; SDG 3 – Kehidupan sehat dan sejahtera
3	Akal	*Hifz al-'Aql*	Mendorong inovasi, pendidikan kewirausahaan, dan peningkatan kapasitas SDM	SDG 4 – Pendidikan berkualitas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

No.	Aspek Maqasid Syariah	Tujuan Syariah	Implikasi dalam Kewirausahaan Sosial	Relevansi dengan SDGs
4	Keturunan	*Hifz al-Nasl*	Menyediakan usaha keluarga berkelanjutan dan mendukung keseimbangan kehidupan	SDG 5 – Kesetaraan gender, SDG 8 – Pekerjaan layak
5	Harta	*Hifz al-Mal*	Menumbuhkan usaha halal, adil, dan inklusif, melawan kemiskinan dan ketimpangan	SDG 1 – Tanpa kemiskinan, SDG 10 – Kurangi ketimpangan

Menurut Jasser Auda (2008), maqāṣid dapat menjadi kerangka etis dalam pembangunan modern, termasuk dalam pencapaian SDGs, karena menekankan keseimbangan antara dimensi material dan spiritual. Maqasid Syariah dalam model penelitian ini bukan sekadar label keagamaan, melainkan variabel integratif yang memberikan arah moral bagi seluruh elemen dalam ekosistem. Pendekatan sistem ini membuktikan bahwa internalisasi nilai-nilai kemaslahatan yang kuat mampu mentransformasi dukungan material menjadi dampak sosial yang terukur dan berkelanjutan bagi masyarakat luas.

Dengan mengintegrasikan ketiga pilar ini, model kewirausahaan sosial tidak hanya akan bersifat ekonomis dan inovatif, tetapi juga beretika, inklusif, dan berkelanjutan. Ini penting dalam konteks Indonesia, di mana nilai-nilai keislaman dan semangat gotong royong sosial masih sangat kuat dalam budaya masyarakat. Maqasid syariah memberikan kerangka etis dan moral yang kuat dalam praktik kewirausahaan. Prinsip-prinsip tersebut mendorong bisnis berkelanjutan yang sejalan dengan prinsip *profit-people-planet* dalam SDGs. Pendekatan ini penting untuk membangun model kewirausahaan sosial berbasis nilai di organisasi seperti HIPMI.

Mengacu pada pendekatan sistem (Auda, 2008), Maqasid Syariah diposisikan sebagai kerangka nilai dinamis yang melampaui pemahaman legalistik tradisional. Dalam penelitian ini, Maqasid Syariah bertindak sebagai filter nilai yang memediasi dinamika ekosistem kewirausahaan menuju pencapaian tujuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

pembangunan berkelanjutan (SDGs), sehingga memastikan setiap aktivitas ekonomi berorientasi pada kemaslahatan umum (Maslahah).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

a. maqāṣid al-sharī‘ah merupakan paradigma normatif yang berorientasi pada kemaslahatan,
b. kewirausahaan sosial merupakan instrumen implementatif dalam bidang ekonomi,
c. dan SDGs merupakan kerangka global pembangunan berkelanjutan.

Ketiganya memiliki titik temu dalam upaya menciptakan kesejahteraan sosial, keadilan ekonomi, dan dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, integrasi maqāṣid al-sharī‘ah dalam kewirausahaan sosial dapat memperkuat kontribusi terhadap pencapaian SDGs, khususnya dalam konteks pembangunan inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

6. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)

a. Sejarah, Visi, Misi, dan Tujuan HIPMI

Latar belakang berdirinya Himpunan Pengusaha Muda Indonesia **(**HIPMI**)** tidak dapat dilepaskan dari konteks pembangunan ekonomi nasional pada awal tahun 1970-an, ketika Indonesia sedang berusaha memperkuat sektor swasta sebagai motor penggerak ekonomi. Pada masa tersebut, dunia usaha di Indonesia masih didominasi oleh kelompok tertentu dan belum terbuka luas bagi generasi muda yang ingin memulai usaha secara mandiri. Kurangnya wadah yang dapat menampung aspirasi serta kebutuhan pengembangan kapasitas pengusaha muda menjadi salah satu pendorong utama dibentuknya organisasi ini (Latief, 1994).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) didirikan pada tanggal 10 Juni 1972 di Jakarta oleh sekelompok pengusaha muda yang dipelopori oleh Ir. H. Abdul Latief, seorang tokoh wirausaha yang juga dikenal sebagai menteri dan pengusaha sukses. Berdirinya HIPMI dimaksudkan untuk menciptakan wadah bagi para pengusaha muda Indonesia agar dapat saling bertukar ide, memperkuat jejaring usaha, dan berperan aktif dalam pembangunan ekonomi nasional (HIPMI, n.d.).

HIPMI memiliki komitmen kuat untuk mencetak wirausahawan muda yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial. Organisasi ini didirikan dengan semangat untuk menciptakan komunitas pengusaha muda yang mampu menjadi tulang punggung perekonomian nasional melalui penciptaan usaha produktif dan penciptaan lapangan kerja (HIPMI, n.d.).

HIPMI lahir sebagai respon terhadap kebutuhan strategis untuk membangun generasi pengusaha muda yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Organisasi ini tidak hanya bertujuan sebagai wadah komunikasi dan kolaborasi antar pengusaha muda, tetapi juga sebagai sarana pendidikan kewirausahaan, advokasi kebijakan, serta penguatan jejaring bisnis di tingkat nasional maupun internasional. Seiring waktu, HIPMI telah berkembang menjadi organisasi kewirausahaan terbesar di Indonesia yang berperan aktif dalam pembangunan ekonomi bangsa.

HIPMI memiliki visi untuk menjadi organisasi pengusaha muda yang unggul, dinamis, dan berdaya saing tinggi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (HIPMI, n.d.). Misi HIPMI meliputi hal-hal berikut:

1) Mendorong lahirnya wirausahawan muda yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.
2) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas anggota HIPMI agar mampu bersaing secara profesional.
3) Menjalin kemitraan strategis antara pengusaha, pemerintah, dan institusi pendidikan.
4) Mengadvokasi kebijakan publik yang berpihak kepada pengusaha nasional.
5) Menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan etika bisnis kepada anggota.

Tujuan utama HIPMI adalah untuk:

1) Mewadahi dan membina pengusaha muda di seluruh Indonesia.
2) Menjadi pusat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kewirausahaan.
3) Mendorong terciptanya lapangan kerja melalui kewirausahaan.
4) Menjadi forum komunikasi dan sinergi antar pengusaha muda.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

5) Meningkatkan kontribusi pengusaha muda dalam pembangunan ekonomi nasional (HIPMI, n.d.; Latief, 1994).

b. Struktur Organisasi dan Keanggotaan

Struktur organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dirancang secara hierarkis dan profesional guna mendukung pelaksanaan visi, misi, serta tujuan organisasi di berbagai tingkatan.



Gambar 2.1
Struktur Organisasi HIPMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Secara umum, struktur organisasi HIPMI terdiri atas:

1. Badan Pengurus Pusat (BPP): Merupakan pengurus tertinggi yang memimpin HIPMI secara nasional dan bertanggung jawab dalam merumuskan arah strategis organisasi secara keseluruhan. Ketua Umum BPP HIPMI dipilih melalui Musyawarah Nasional (Munas).
2. Badan Pengurus Daerah (BPD): Mengelola kegiatan organisasi di tingkat provinsi dan menjembatani program nasional dengan pelaksanaan daerah.

BPD berkoordinasi langsung dengan BPP dalam menjalankan program-program kewirausahaan.

3. Badan Pengurus Cabang (BPC): Bertugas di tingkat kabupaten/kota dan menjadi ujung tombak dalam merekrut, membina, serta mengembangkan anggota HIPMI secara lokal. BPC merupakan pelaksana langsung program HIPMI di lapangan.
4. Bidang-bidang dan Departemen: Setiap tingkatan pengurus memiliki sejumlah bidang yang menangani fungsi-fungsi spesifik, seperti bidang organisasi dan keanggotaan, pelatihan dan pendidikan, kerja sama, ekonomi kreatif, hingga hukum dan advokasi.

BPP HIPMI dipimpin oleh seorang Ketua Umum dan didukung oleh sekretaris jenderal, bendahara umum, serta berbagai ketua bidang. BPD dan BPC mengikuti pola kepemimpinan yang sama, dengan pengurus yang berasal dari anggota aktif di wilayah tersebut. Selain itu, HIPMI juga membentuk lembaga otonom seperti HIPMI PT (Perguruan Tinggi) untuk membina calon pengusaha dari kalangan mahasiswa dan Badan Otonom HIPMI yang fokus pada kegiatan strategis tertentu (HIPMI, n.d.). HIPMI PT bertujuan menjaring dan mempersiapkan wirausahawan dari kalangan mahasiswa, sebagai langkah awal regenerasi pengusaha nasional. HIPMI PT berfungsi untuk membina dan mencetak calon pengusaha muda dari kalangan mahasiswa, melatih kepemimpinan, inovasi, dan wirausaha sejak dini, dan menjadi wadah kaderisasi calon anggota HIPMI di masa depan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Badan otonom HIPMI lainnya adalah:

1. HIPMI Business School (HBS) berfungsi untuk menyediakan pendidikan formal dan nonformal di bidang manajemen dan kewirausahaan, menjadi pusat riset dan pengembangan kewirausahaan muda, dan Menjalin kemitraan akademik dengan kampus dan lembaga riset bisnis;
2. Lembaga Wakaf HIPMI berfungsi untuk mengelola dana wakaf dan filantropi untuk kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat dan mendukung program HIPMI Peduli dan ekonomi berbasis syariah;

3. Badan Pengembangan Ekonomi Kreatif (BEKRAF HIPMI) berfungsi untuk mendorong pelaku usaha di sektor ekonomi kreatif (kuliner, fashion, seni, dll) dan Menyediakan inkubasi, pelatihan, dan koneksi pasar bagi pelaku industri kreatif;
4. HIPMI Tax Center berfungsi untuk memberikan edukasi perpajakan kepada pelaku UMKM dan anggota HIPMI dan Edukasi perpajakan kepada pelaku UMKM dan anggota HIPMI; dan
5. Badan Pengusaha Milenial (BPM HIPMI) berfungsi sebagai wadah untuk pengusaha muda generasi milenial dan Gen Z dan Mendorong inovasi bisnis berbasis digital dan teknologi.

Keanggotaan HIPMI terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia yang berusia maksimal 41 tahun dan aktif sebagai pelaku usaha atau minat tinggi terhadap kewirausahaan. Organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menetapkan batas usia anggota maksimal 41 tahun sebagai bagian dari karakter organisasi yang berfokus pada pengembangan kewirausahaan generasi muda di Indonesia. Ketentuan ini bukan sekadar administratif, tetapi memiliki dasar filosofis, organisasi, dan strategis dalam pengembangan ekosistem kewirausahaan nasional.

Kriteria dan mekanisme keanggotaan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) HIPMI. Keanggotaan dibagi menjadi dua kategori utama:

1. Anggota Biasa: Individu yang telah memiliki atau sedang menjalankan usaha secara aktif.
2. Anggota Luar Biasa: Mereka yang belum memiliki usaha sendiri namun memiliki minat tinggi terhadap dunia kewirausahaan, termasuk mahasiswa dan akademisi (HIPMI, 2020).

Anggota HIPMI mendapatkan akses terhadap pelatihan dan pengembangan bisnis, jaringan bisnis pengusaha nasional, forum diskusi dan promosi bisnis, serta dukungan advokasi dan kemitraan strategis dengan sektor pemerintah maupun swasta. Keanggotaan bersifat personal dan melekat pada individu, bukan atas nama perusahaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

c. Program Kerja HIPMI

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) sebagai organisasi kewirausahaan terbesar di Indonesia memiliki peran strategis dalam pengembangan kapasitas wirausahawan muda dan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. HIPMI memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas kewirausahaan nasional. Program kerja HIPMI dirancang secara sistematis untuk menjawab tantangan kewirausahaan sekaligus mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Program kerja HIPMI didesain sebagai bagian integral dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekosistem bisnis, serta percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis kewirausahaan, khususnya bagi generasi muda. Di antara program kerja yang dilakukan HIPMI adalah:

1. *Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan*; Salah satu fokus utama program kerja HIPMI adalah peningkatan kompetensi dan kapasitas anggota melalui kegiatan pelatihan, seminar, *workshop*, dan *bootcamp* kewirausahaan. Program pelatihan merupakan pilar utama dalam pengembangan anggota HIPMI. Program-program ini diarahkan untuk membekali anggota dengan keterampilan teknis, manajerial, serta pemahaman terhadap dinamika pasar dan inovasi digital. Program unggulan seperti HIPMI Business School (HBS), HIPMI Goes to Campus, dan HIPMI Training Center merupakan bentuk konkret dari upaya peningkatan literasi bisnis dan profesionalisme pengusaha muda. Program HIPMI Business School (HBS) dan HIPMI Goes to Campus menjadi sarana sistematis dalam memfasilitasi transfer pengetahuan bisnis dan kepemimpinan kepada para pengusaha muda maupun mahasiswa yang tertarik pada dunia usaha (HIPMI, n.d.)
2. *Penguatan Ekosistem Bisnis dan Kemitraan Strategis*; HIPMI aktif menjembatani kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan sektor swasta serta lembaga internasional untuk mendukung pengembangan bisnis anggotanya. Dalam hal ini, program kerja mencakup fasilitasi kemitraan, *business matching*, penguatan UMKM, serta advokasi kebijakan yang pro-entrepreneur. HIPMI juga sering terlibat dalam forum-forum ekonomi nasional

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

maupun internasional, termasuk B20 dan forum G20. Tujuan jangka panjang dari program ini adalah mendorong pengusaha muda masuk dalam rantai pasok industri nasional dan global (BPP HIPMI, 2020).

3. *Inkubasi dan Akselerasi Startup*; Sebagai respons terhadap perkembangan ekonomi digital, HIPMI turut mengembangkan program inkubator bisnis dan *startup accelerator* yang menyasar pengusaha pemula dan berbasis teknologi. Program ini bertujuan mempercepat lahirnya startup inovatif yang mampu bersaing secara global. Fokus dari program ini adalah mendukung transformasi digital pelaku usaha muda, mendorong penciptaan inovasi berbasis teknologi, serta memfasilitasi akses terhadap pendanaan dan mentoring oleh pengusaha senior.
4. *Pembinaan HIPMI PT (Perguruan Tinggi)*; HIPMI juga menyelenggarakan program kerja melalui unit otonom HIPMI PT yang bergerak di lingkungan kampus. Program ini melibatkan mahasiswa dalam berbagai kegiatan kewirausahaan. HIPMI PT fokus pada pendidikan kewirausahaan bagi mahasiswa, pembentukan karakter wirausahawan muda, serta penguatan jejaring antara kampus dan dunia usaha. Program seperti lomba bisnis, mentoring usaha mahasiswa, hingga *business incubation* di kampus menjadi bagian dari upaya regenerasi pengusaha muda. HIPMI PT berperan sebagai *pipeline* untuk mencetak generasi pengusaha yang adaptif dan inovatif. HIPMI Perguruan Tinggi (HIPMI PT) memiliki peran strategis sebagai wadah pembinaan, pengembangan, dan penguatan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa. HIPMI PT hadir bukan hanya sebagai organisasi kemahasiswaan biasa, tetapi sebagai ekosistem pembentuk entrepreneur muda yang mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan perkembangan era digital.
5. *Kontribusi Sosial dan Pembangunan Berkelanjutan*; Sebagai organisasi yang menjunjung nilai keberlanjutan, HIPMI menjalankan berbagai program sosial seperti HIPMI Peduli, pemberdayaan desa, dan wirausaha sosial berbasis komunitas, serta pendampingan UMKM di daerah tertinggal. Melalui kegiatan ini, HIPMI menunjukkan komitmen terhadap pembangunan inklusif dan berbasis masyarakat. Tujuan jangka panjang dari program ini adalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

menjadikan kewirausahaan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.

d. HIPMI dan Kewirausahaan Sosial

Kewirausahaan sosial merupakan bentuk inovatif dari aktivitas kewirausahaan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga pada penciptaan nilai sosial yang berkelanjutan. Di tengah kompleksitas permasalahan sosial di Indonesia, kewirausahaan sosial menjadi salah satu pendekatan strategis dalam menciptakan solusi yang inklusif dan memberdayakan. Dalam konteks ini, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) memiliki peran penting dalam memperkuat ekosistem kewirausahaan sosial, terutama melalui pembinaan generasi muda, penguatan jejaring bisnis, dan kolaborasi multisektor.

Sebagai organisasi kepengusahaaan yang telah berdiri sejak 1972, HIPMI tidak hanya menjadi wadah pengusaha muda yang berorientasi pada keuntungan, tetapi juga telah mengembangkan peran sebagai agen perubahan sosial (agent of change). Melalui berbagai program kerja seperti *HIPMI Peduli, HIPMI Goes to Campus*, dan kolaborasi dengan pesantren maupun lembaga pendidikan tinggi, HIPMI mendorong lahirnya pelaku usaha muda yang peka terhadap isu-isu sosial seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendidikan, dan pemberdayaan komunitas marjinal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Di tengah meningkatnya tantangan sosial dan ketimpangan ekonomi, konsep kewirausahaan sosial menjadi semakin relevan sebagai solusi yang mengintegrasikan pencapaian keuntungan ekonomi dengan nilai sosial. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) sebagai organisasi strategis yang menghimpun pengusaha muda nasional memainkan peran penting dalam mendorong ekosistem kewirausahaan sosial di Indonesia.

HIPMI memiliki posisi unik sebagai jembatan antara sektor bisnis, pemerintah, dan masyarakat. Dalam konteks kewirausahaan sosial, HIPMI berperan sebagai:

1. Inkubator Ide dan Aksi Sosial-Bisnis; HIPMI mendorong anggotanya, terutama generasi muda, untuk tidak hanya menciptakan usaha yang berorientasi profit, tetapi juga memiliki *impact* terhadap masyarakat. Berbagai pelatihan, workshop, dan kompetisi yang diselenggarakan HIPMI mengusung pendekatan bisnis inklusif dan berkelanjutan.
2. Fasilitator Kolaborasi Multisektor; HIPMI aktif mendorong kemitraan antara pengusaha dengan lembaga sosial, pesantren, universitas, dan pemerintah daerah dalam mengembangkan model kewirausahaan sosial. HIPMI menjadi ruang kolaborasi bagi pengusaha muda yang ingin menciptakan solusi atas masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, atau akses pendidikan.
3. Promotor Kewirausahaan Berbasis SDGs; Dalam beberapa forum nasional dan internasional, HIPMI menunjukkan komitmen untuk mendukung agenda Sustainable Development Goals (SDGs), terutama poin terkait pertumbuhan ekonomi inklusif, pengurangan kesenjangan, dan pemberdayaan komunitas. Program-program seperti *HIPMI Peduli*, *HIPMI for UMKM*, dan *HIPMI Goes to Campus* menjadi medium strategis untuk mendekatkan kewirausahaan pada kelompok marginal dan generasi muda.
4. Katalisator Regulasi dan Advokasi; HIPMI secara aktif memberikan masukan kepada pemerintah terkait kebijakan kewirausahaan, termasuk penguatan regulasi dan insentif bagi pelaku *social entrepreneurship*. HIPMI juga mendorong skema pembiayaan inovatif seperti *social venture capital* dan *blended finance.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Meskipun HIPMI telah memainkan peran penting dalam memajukan kewirausahaan sosial, tantangan tetap ada. Keterbatasan pemahaman anggota mengenai konsep kewirausahaan sosial secara holistik, minimnya dukungan kebijakan di tingkat daerah, serta belum terbentuknya metrik dampak sosial yang baku menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan bersama. Namun demikian, dengan meningkatnya kesadaran generasi muda dan dorongan inovasi berbasis teknologi, HIPMI memiliki peluang besar untuk menjadi aktor kunci dalam

membangun ekosistem kewirausahaan sosial yang kuat, progresif, dan berorientasi pada perubahan sosial yang berkelanjutan.

Keterlibatan HIPMI dalam mendukung kewirausahaan sosial menjadi relevan dalam upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada target pengentasan kemiskinan (SDG 1), pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8), serta kemitraan untuk pembangunan (SDG 17). HIPMI memainkan peran sebagai penggerak wirausaha muda yang tidak hanya cakap secara bisnis, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial. Dengan demikian, HIPMI tidak hanya berfungsi sebagai organisasi bisnis, tetapi juga sebagai motor penggerak perubahan sosial. Mendorong kewirausahaan sosial menjadi bagian dari agenda strategis HIPMI untuk menciptakan generasi pengusaha muda yang adaptif, inovatif, dan berkomitmen pada pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait dengan kewirausahaan telah banyak dilakukan. Di bawah ini akan ditampilkan tabel daftar beberapa penelitian yang terkait kewirausahaan dan SDGs.

Tabel 2.13
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Penulis	Tahun	Temuan Utama
1	The Role of Entrepreneurship in Economic Development	Acs, Z. J., & Audretsch, D. B.	2003	Kewirausahaan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan inovasi dan penciptaan lapangan kerja.
2	Social and Commercial Entrepreneurship: Same, Different, or Both?	Mair, J., & Marti, I.	2006	Kewirausahaan sosial dan komersial memiliki perbedaan dalam tujuan utama, namun berbagi karakteristik proses.
3	Social Innovation and Sustainable Development	Mulgan, G.	2007	Inovasi sosial memainkan peran penting dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

No	Judul Penelitian	Penulis	Tahun	Temuan Utama
				mendukung pembangunan berkelanjutan.
4	A Typology of Social Entrepreneurs	Zahra, S. A., Gedajlovic, E., Neubaum, D. O., & Shulman, J. M.	2009	Kewirausahaan sosial dapat diklasifikasi berdasarkan motif (altruistik vs. inovatif), dengan tantangan etis yang khas.
5	Entrepreneurial Intentions Among University Students	Liñán, F., & Chen, Y. W.	2009	Sikap, norma sosial, dan efikasi diri berpengaruh signifikan terhadap niat berwirausaha mahasiswa.
6	Building Social Business	Muhammad Yunus	2010	Kewirausahaan sosial berperan sebagai bentuk kapitalisme baru yang memprioritaskan dampak sosial daripada profit maksimal.
7	Entrepreneurial Ecosystems and Growth-Oriented Entrepreneurship	Isenberg, D. J.	2010	Ekosistem kewirausahaan terdiri dari berbagai elemen seperti akses ke modal, pasar, dan budaya kewirausahaan.
8	The Role of Social Entrepreneurs in Achieving SDGs	Nicholls, A.	2010	Wirausaha sosial berperan sebagai agen perubahan dalam menciptakan dampak sosial berkelanjutan yang sejalan dengan SDGs.
9	Ecosystem-Based Approaches to Social Enterprise	Corner, P. D., & Ho, M.	2010	Pendekatan ekosistem memperkuat kolaborasi dan keberlanjutan wirausaha sosial.
10	How to Start an Entrepreneurial Revolution	Isenberg, D.	2010	Konsep ekosistem kewirausahaan menekankan pentingnya konektivitas dan budaya lokal yang mendukung.
11	Integrasi Model Ekosistem Kewirausahaan dan SDGs	Isenberg, D. J.	2011	Ketersediaan pembiayaan, regulasi pro-sosial, dan dukungan komunitas menjadi faktor utama

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

No	Judul Penelitian	Penulis	Tahun	Temuan Utama
				keberhasilan startup sosial.
12	Achieving SDGs through Social Enterprises	Dacin, M. T., Dacin, P. A., & Tracey, P.	2011	Sosial enterprise menyediakan solusi inovatif terhadap tantangan sosial dan ekonomi global.
13	The Role of Networks in Supporting Social Entrepreneurs	Lyon, F., & Fernandez, H.	2012	Jejaring sosial penting untuk keberlanjutan dan skalabilitas.
14	Social Entrepreneurship and Entrepreneurial Ecosystems	Santos, F. M.	2013	Wirausaha sosial butuh dukungan sistemik dari ekosistem agar berdampak berkelanjutan.
15	Entrepreneurial Ecosystem: Economic, Technological, and Societal Impacts	Mason, C., & Brown, R.	2014	Ekosistem harus mencakup akses ke modal, pasar, SDM, dan dukungan kebijakan.
16	Building an Entrepreneurial Ecosystem in Emerging Markets	Stam, E.	2015	Ekosistem yang kuat ditandai oleh interaksi antar aktor, institusi, dan lingkungan inovatif.
17	Entrepreneurial Ecosystems and Regional Policy	Stam, E.	2015	Ekosistem kewirausahaan ditentukan oleh interaksi antara aktor, institusi, dan lingkungan inovatif yang mendukung.
18	*Social Entrepreneurship and the SDGs: Building the Bridge*	George, Howard-Grenville, Joshi & Tihanyi	2016	Studi teoretis dan empiris tentang bagaimana wirausaha sosial mengisi celah dalam sistem konvensional untuk mencapai target SDGs.
19	Integrating the SDGs into Development Planning	OECD	2016	Integrasi SDGs dalam kebijakan nasional memerlukan sinergi lintas sektor dan indikator terukur.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

No	Judul Penelitian	Penulis	Tahun	Temuan Utama
20	Private Sector Engagement with the SDGs	Scheyvens, R., Banks, G., & Hughes, E.	2016	Sektor swasta memiliki peran strategis dalam mencapai SDGs, terutama melalui inovasi dan investasi berkelanjutan.
21	Building Entrepreneurial Ecosystems in Sub-Saharan Africa	Ndemo, B., & Weiss, T.	2017	Dibutuhkan pendekatan sistemik dalam mengembangkan ekosistem kewirausahaan di negara berkembang.
22	Entrepreneurial Ecosystems in Emerging Economies	Autio, E., & Levie, J.	2017	Ekosistem di negara berkembang menghadapi tantangan pada infrastruktur, regulasi, dan modal ventura.
23	*Social Enterprises and the Sustainable Development Goals: A Global Mapping*	Littlewood & Holt	2018	Studi global mengenai kontribusi social enterprise terhadap SDGs, khususnya pada tujuan pengurangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
24	Social Entrepreneurship and the SDGs	Littlewood, D., & Holt, D.	2018	Kewirausahaan sosial memainkan peran penting dalam pencapaian SDGs dengan pendekatan berbasis komunitas dan keberlanjutan.
25	Social Entrepreneurship in Indonesia: Opportunities and Challenges	M. Widianingsih	2019	Kajian umum mengenai tantangan ekosistem kewirausahaan sosial di Indonesia. Relevan sebagai referensi untuk konteks nasional.
26	*The Role of Social Entrepreneurship in Achieving the Sustainable Development Goals*	Saebi, Foss & Linder	2019	Analisis konseptual tentang bagaimana model kewirausahaan sosial berkontribusi terhadap SDGs melalui inovasi sosial.
27	Peran Kewirausahaan	UNDP	2019	UMKM sosial terbukti berkontribusi pada SDG 1 (kemiskinan) dan SDG 8

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

No	Judul Penelitian	Penulis	Tahun	Temuan Utama
	Sosial dalam Mewujudkan SDGs			(pekerjaan layak) melalui model bisnis partisipatif.
28	Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Report	Bosma, N., & Kelley, D.	2019	Tingkat kewirausahaan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan kebijakan negara.
29	Developing Ecosystems for Social Enterprises in Southeast Asia	Nguyen, T. M., & Pham, T. H.	2019	Perlu dukungan kebijakan, pembiayaan inovatif, dan kapasitas lokal.
30	Kewirausahaan Sosial Sebagai Solusi Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia	R. Firmansyah	2020	Menekankan pentingnya kewirausahaan sosial dalam menyelesaikan masalah sosial lokal melalui pendekatan inovatif dan partisipatif.
31	*Implementing the SDGs: The Role of Social Enterprises*	UNDP & British Council	2020	Laporan kolaboratif yang menggambarkan praktik baik social enterprise dalam mendukung implementasi SDGs di berbagai negara.
32	Kolaborasi Multisektor dalam Pengembangan Kewirausahaan Sosial	Setiawan, J. L. & Habibie, A.	2020	Kolaborasi antara HIPMI dan pesantren menciptakan model kewirausahaan sosial berbasis nilai dan komunitas.
33	Sinergi HIPMI dan Pesantren dalam Penguatan Kewirausahaan Sosial	Setiawan, J. L. & Habibie, A.	2020	Kerja sama HIPMI dengan pesantren mendorong tumbuhnya unit usaha produktif berbasis nilai-nilai keislaman dan sosial.
34	Peran Organisasi HIPMI dalam Meningkatkan Kewirausahaan Pemuda di Era Ekonomi Digital	M. A. Rahman	2021	Mengulas peran HIPMI dalam memfasilitasi pelatihan dan mentoring bagi wirausaha muda. Belum fokus pada misi sosial, tapi menunjukkan potensi transformasi ke arah sosial-preneurship.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

No	Judul Penelitian	Penulis	Tahun	Temuan Utama
35	*Kewirausahaan Sosial sebagai Strategi Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)*	N. Ramadhani	2021	Studi kasus lokal di Indonesia tentang kontribusi wirausaha sosial dalam mendukung Tujuan SDGs 1 (Tanpa Kemiskinan) dan 8 (Pekerjaan Layak).
36	Model Pemberdayaan Ekonomi Berbasis HIPMI di Kalangan Mahasiswa	Rachman, A.	2021	Program HIPMI PT terbukti meningkatkan minat mahasiswa dalam berwirausaha melalui pendekatan komunitas.
37	Measuring Progress Towards the SDGs	Sachs, J. D., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., & Fuller, G.	2021	Indeks SDG digunakan untuk membandingkan kemajuan negara secara global, dengan kebutuhan data yang lebih inklusif dan real-time.
38	Penguatan Ekosistem Kewirausahaan Sosial Melalui HIPMI	Hidayat, A. & Wibowo, T.	2021	HIPMI menjadi penggerak ekosistem kewirausahaan sosial melalui mentoring, networking, dan akses pendanaan.
39	Kolaborasi HIPMI dan Lembaga Pendidikan untuk Membangun Ekosistem Wirausaha	Fitriani, D. & Yusuf, H.	2021	Kolaborasi dengan pesantren dan universitas membentuk ekosistem yang mendukung lahirnya wirausaha sosial muda.
40	Model Pemberdayaan Berbasis Komunitas oleh Pengusaha Muda dalam Mendukung SDGs	Y. Santosa & L. Arifin	2022	Studi kasus anggota HIPMI di daerah yang menciptakan model bisnis inklusif untuk pengolahan limbah dan pemberdayaan perempuan.
41	Membangun Ekosistem Kewirausahaan Sosial di Indonesia	HIPMI	2022	HIPMI memainkan peran penting dalam menciptakan ekosistem kewirausahaan sosial melalui kaderisasi, jejaring bisnis, dan kolaborasi lintas sektor.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

No	Judul Penelitian	Penulis	Tahun	Temuan Utama
42	Peran HIPMI dalam Mendorong Kewirausahaan Muda di Indonesia	BPP HIPMI	2022	HIPMI berperan strategis dalam mencetak wirausahawan muda melalui pelatihan, mentorship, dan akses jejaring bisnis.
43	Keterlibatan HIPMI dalam Pencapaian SDGs melalui Program Kewirausahaan	Prasetyo, H. & Sari, D.	2022	Kegiatan kewirausahaan HIPMI mendukung SDGs terutama dalam pengurangan pengangguran dan kemiskinan.
44	Peran HIPMI dalam Mendorong Inovasi Sosial dan Ekonomi Berkelanjutan	Putri, R. D. & Nugroho, B.	2022	HIPMI mendorong inovasi sosial berbasis kewirausahaan yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan.
45	Analisis Peran HIPMI dalam Pengembangan UMKM Sosial	Wijaya, F. & Lestari, M.	2022	HIPMI berperan dalam peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM sosial berbasis komunitas.
46	HIPMI dan Inovasi Sosial dalam Ekonomi Kerakyatan	D. Haryanto	2023	Menjelaskan potensi dan tantangan HIPMI dalam mengembangkan bisnis yang juga memiliki nilai keberlanjutan sosial.
47	Strategi HIPMI dalam Membangun Ekosistem Kewirausahaan Inklusif	Fauzi, M.	2023	HIPMI mendorong kebijakan inklusif dan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan.
48	The Sustainable Development Goals Report	United Nations	2023	Laporan menunjukkan kemajuan dan tantangan global dalam mencapai 17 SDGs, dengan perhatian khusus pada perubahan iklim dan ketimpangan.
49	Bridging Climate Awareness and Sustainable Entrepreneurship: A Conceptual	Islam, M. R., & Mehdi, A. A	2024	Penelitian ini mengembangkan kerangka konseptual yang menghubungkan kesadaran iklim dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

No	Judul Penelitian	Penulis	Tahun	Temuan Utama
	Framework Based on the Theory of Planned Behavior			niat berwirausaha berkelanjutan, menggunakan Theory of Planned Behavior sebagai dasar.
50	Natural Disasters and Social Entrepreneurship: An Attention-Based View	*Wei, S., Boudreaux, C. J., Su, Z., & Wu, Z*	2024	Studi ini menemukan bahwa intensitas bencana alam meningkatkan kemungkinan individu terlibat dalam kewirausahaan sosial, dengan efek yang lebih besar pada pria, individu dengan modal manusia rendah, dan mereka yang takut gagal.
51	Robotic Process Automation as a Driver for Sustainable Innovation and Entrepreneurship	Prucha, P	2024	Studi ini menunjukkan bahwa adopsi Robotic Process Automation (RPA) oleh perusahaan besar memiliki korelasi positif dengan skor ESG (Environmental, Social, and Governance), yang mendukung inovasi berkelanjutan dan kewirausahaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Berdasarkan penelusuran literatur tersebut, belum ada penelitian yang secara khusus mengaitkan HIPMI dengan model ekosistem kewirausahaan sosial dan SDGs. Organisasi kewirausahaan seperti HIPMI dapat menjadi katalisator pencapaian SDGs melalui pendekatan kewirausahaan sosial.

C. Kerangka Pemikiran

Pengembangan ekosistem kewirausahaan sosial menuntut adanya interaksi antara berbagai aktor seperti pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas. Pendekatan ini sejalan dengan konsep Innovation Ecosystem Theory, yang menekankan pentingnya kolaborasi dalam lingkungan sistemik untuk mendorong

inovasi (Moore, 1996; Autio & Thomas, 2014). Dalam konteks ini, HIPMI diposisikan sebagai aktor kunci dalam sistem kewirausahaan nasional yang dapat menciptakan sinergi antara sektor publik dan swasta.

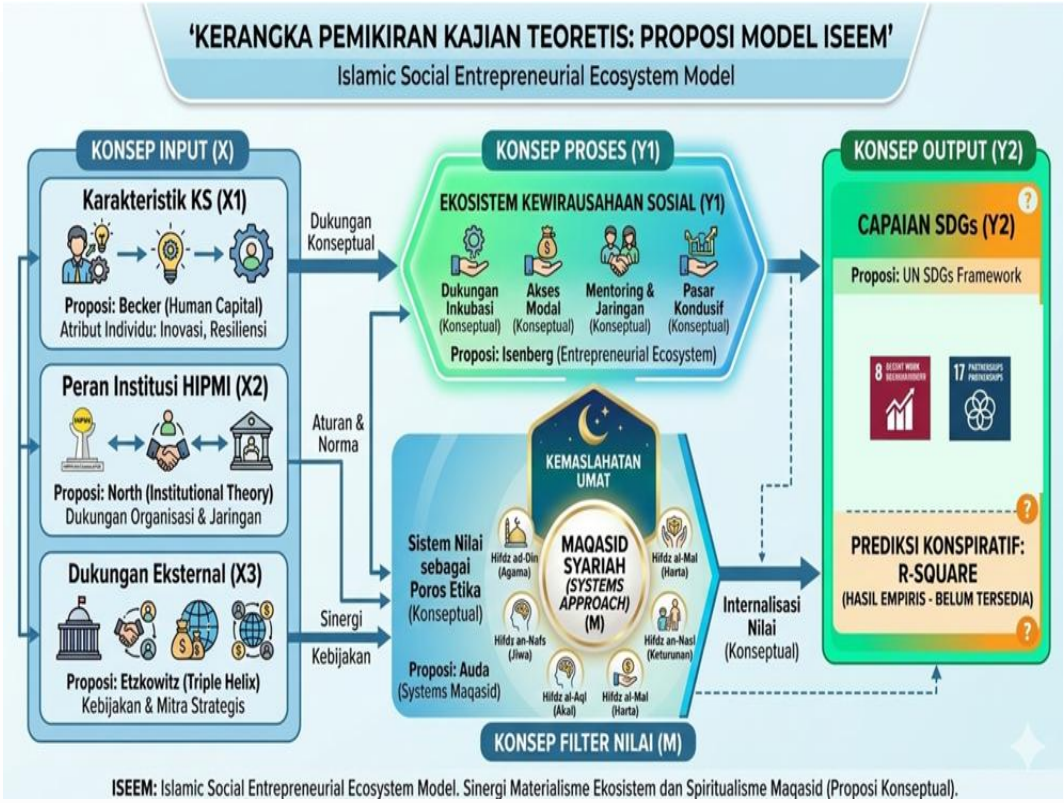
Lebih lanjut, pendekatan kewirausahaan sosial menyoroti pentingnya menciptakan nilai sosial melalui aktivitas bisnis. Pengusaha sosial tidak hanya mengejar keuntungan, melainkan juga berorientasi pada penyelesaian masalah sosial secara berkelanjutan (Dees, 1998; Zahra et al., 2009). HIPMI, sebagai organisasi pengusaha muda, memiliki potensi untuk mencetak generasi wirausaha sosial yang mampu menjawab tantangan sosial-ekonomi.

Dalam dimensi terapan, model Triple Helix mendorong kolaborasi antara universitas, industri, dan pemerintah dalam menciptakan inovasi sosial (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). Hal ini diperkuat oleh Stakeholder Theory, yang menekankan bahwa pengembangan ekosistem kewirausahaan harus melibatkan semua pemangku kepentingan secara aktif (Freeman, 1984). Selain itu, integrasi kerangka kerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menjadi penting sebagai arah dan tolok ukur dampak sosial dari kewirausahaan (United Nations, 2015).

Ekosistem yang kuat mampu menciptakan dampak nyata dalam pencapaian SDGs, terutama pada pengentasan kemiskinan (SDG 1), pendidikan berkualitas (SDG 4), kesetaraan gender (SDG 5), pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8), serta inovasi dan infrastruktur (SDG 9). Namun demikian, hubungan antara ekosistem kewirausahaan sosial dan kontribusi terhadap SDGs tidak terlepas dari dimensi nilai-nilai Islam. Dalam penelitian ini, Maqāṣid al-Sharī‘ah berperan sebagai variabel moderasi yang memastikan bahwa pembangunan ekosistem kewirausahaan sosial dan kontribusinya pada SDGs tetap sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip maqāṣid yang meliputi *hifz al-dīn (perlindungan agama)*, *hifz al-nafs (perlindungan jiwa)*, *hifz al-‘aql (perlindungan akal)*, *hifz al-nasl (perlindungan keturunan)*, dan *hifz al-māl (perlindungan harta)* menjadi pedoman dalam menjaga keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan spiritual.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Dengan demikian, kerangka pemikiran penelitian ini menekankan bahwa ekosistem kewirausahaan sosial dibangun dari karakteristik wirausahawan, peran HIPMI, dan dukungan eksternal. Ekosistem yang terbentuk kemudian berkontribusi terhadap pencapaian SDGs, dengan maqāṣid al-sharī‘ah sebagai penguat agar arah pembangunan berkelanjutan sejalan dengan nilai-nilai Islam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komponen Input: Determinasi Modal Manusia dan Institusi (X)

Alur pemikiran model ini dimulai dari tiga pilar utama yang menjadi determinan awal. Pertama, Karakteristik Kewirausahaan Sosial (X1) yang berpijak pada *Human Capital Theory* (Becker), menekankan bahwa kualitas individu pengusaha sebagai inovator sosial adalah modal dasar. Kedua, Peran Institusi HIPMI (X2) yang merujuk pada *Institutional Theory* (North), menyediakan aturan main, jaringan, dan legitimasi bagi pengusaha muda. Ketiga, Dukungan Eksternal

(X3) yang dijelaskan melalui *Triple Helix Model* (Etzkowitz), menggambarkan bagaimana kolaborasi antara pemerintah dan mitra strategis memberikan dorongan kebijakan dan sumber daya.

2. Komponen Proses: Dinamika Ekosistem Kewirausahaan Sosial (Y1)

Sinergi dari ketiga faktor input tersebut (individu, organisasi, dan eksternal) kemudian membentuk Ekosistem Kewirausahaan Sosial (Y1). Sesuai dengan *Ecosystem Model* (Isenberg), ekosistem ini merupakan "tanah subur" yang terdiri dari dukungan inkubasi, kemudahan akses modal, budaya mentoring, serta pasar yang kondusif. Pada tahap ini, seluruh dukungan dikelola secara sistemik untuk menciptakan lingkungan usaha yang resilien bagi anggota HIPMI.

3. Value Filter: Mediasi Maqasid Syariah (M)

Kebaruan (*novelty*) utama dalam kerangka pemikiran ini terletak pada variabel Maqasid Syariah (M) sebagai *Value Filter*. Berbeda dengan model ekosistem konvensional yang bersifat mekanistik, model ISEEM mengintegrasikan pendekatan sistem (*Systems Approach*) Jasser Auda. Ekosistem material yang telah terbentuk tidak langsung menuju dampak global, melainkan difilter melalui nilai-nilai kemaslahatan (*Maslahah*): perlindungan agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-mal*). Proses internalisasi nilai ini memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi di HIPMI memiliki orientasi teologis dan etis yang kuat.

4. Komponen *Output*: Capaian SDGs (Y2)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Muara akhir dari kerangka pemikiran ini adalah Capaian SDGs (Y2). Model ini memproposisikan bahwa ketika sebuah ekosistem kewirausahaan yang kuat dipandu oleh nilai Maqasid Syariah, maka kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan (seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan, hingga penanganan perubahan iklim global) akan meningkat secara signifikan. Secara konseptual, model ini memprediksi daya pengaruh terhadap capaian SDGs untuk membuktikan bahwa integrasi nilai spiritual dan material adalah kunci akselerasi agenda global 2030.

Kerangka pemikiran ini adalah satu kesatuan sistem. Input (X) adalah mesin penggeraknya, Ekosistem Kewirausahaan Sosial (Y1) adalah medianya, dan

Maqasid Syariah (M) adalah kompas moralnya. Tanpa filter Maqasid, dukungan ekosistem mungkin hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, namun dengan Maqasid, pertumbuhan tersebut bertransformasi menjadi kemaslahatan universal yang terukur melalui SDGs (Y2).

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan sintesis literatur dan kerangka pemikiran teoretis yang telah dibangun, penelitian ini mengajukan serangkaian proposisi konseptual yang mengintegrasikan dimensi material ekosistem dengan dimensi spiritual Maqasid Syariah. Proposisi ini dirumuskan dalam bentuk hipotesis konseptual sebagai berikut:

1. Determinasi Faktor Input terhadap Ekosistem Kewirausahaan Sosial

Karakteristik kewirausahaan sosial merepresentasikan kemampuan individual yang meliputi inovasi, kreativitas, resiliensi, orientasi sosial, dan kemampuan adaptasi. Dalam perspektif Human Capital Theory yang dikemukakan oleh Gary Becker, kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam menciptakan produktivitas dan pengembangan ekosistem ekonomi. Individu yang memiliki kapasitas inovatif dan daya tahan tinggi cenderung lebih mampu membangun jejaring, memanfaatkan peluang, serta menciptakan aktivitas kewirausahaan yang berkelanjutan.

Dalam konteks ekosistem kewirausahaan sosial Islam, karakteristik kewirausahaan sosial menjadi fondasi utama dalam membangun dukungan inkubasi, akses modal, mentoring, dan jaringan kolaboratif. Semakin tinggi karakteristik kewirausahaan sosial yang dimiliki pelaku usaha, maka semakin kuat pengembangan ekosistem kewirausahaan sosial yang terbentuk.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Hipotesis 1 (H1a): Diduga, terdapat pengaruh positif dan signifikan dari Karakteristik Kewirausahaan Sosial (X1) terhadap pembentukan Ekosistem Kewirausahaan Sosial (Y1) di HIPMI.

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) beroperasi dalam sebuah lingkungan institusional yang kompleks. Merujuk pada *Human Capital Theory* (Becker, 1964) dan *Institutional Theory* (North, 1990), kualitas individu dan aturan

main organisasi merupakan fondasi utama ekosistem. Peran institusi HIPMI merefleksikan dukungan kelembagaan dalam bentuk pembinaan, penguatan jaringan, pendampingan usaha, dan fasilitasi kewirausahaan.

Menurut *Institutional Theory* yang dikembangkan oleh Douglass North, institusi memiliki fungsi penting dalam membentuk aturan, norma, dan struktur yang memengaruhi aktivitas ekonomi dan perilaku sosial. Dalam konteks penelitian ini, HIPMI berperan sebagai institutional enabler yang mampu menciptakan lingkungan kewirausahaan yang kondusif, legitimasi sosial, dan akses terhadap sumber daya ekonomi dan jaringan bisnis. Semakin kuat dukungan kelembagaan HIPMI, maka semakin berkembang ekosistem kewirausahaan sosial yang mendukung pertumbuhan usaha berbasis sosial dan nilai Islam.

Hipotesis 2 (H1b): Diduga, terdapat pengaruh positif dan signifikan dari Peran Institusi HIPMI (X2) terhadap pembentukan Ekosistem Kewirausahaan Sosial (Y1).

2. Dinamika Sinergi Aktor Eksternal dalam Triple Helix

Dukungan eksternal mencakup kebijakan pemerintah, kemitraan strategis, dukungan akademik, sektor bisnis, dan masyarakat. Akselerasi pembangunan ekosistem memerlukan kolaborasi lintas aktor. Sesuai dengan *Triple Helix Model* (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000), sinergi antara pemerintah (regulator), industri (HIPMI), dan mitra strategis merupakan akselerator inovasi sosial. Dalam pengembangan kewirausahaan sosial Islam, dukungan eksternal menjadi faktor penting untuk menciptakan pasar yang kondusif, keberlanjutan usaha, dan penguatan jejaring sosial ekonomi. Semakin besar dukungan eksternal yang diterima, maka semakin kuat ekosistem kewirausahaan sosial yang terbentuk.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Hipotesis 3 (H1c): Diduga, terdapat pengaruh positif dan signifikan dari Dukungan Eksternal (X3) terhadap pembentukan Ekosistem Kewirausahaan Sosial (Y1) di HIPMI.

3. Internalisasi Nilai Maqasid Syariah sebagai Sistem Dinamis

Kebaruan (*novelty*) model penelitian ini terletak pada integrasi nilai spiritual. Dengan menggunakan *Systems Approach of Maqāṣid al-Sharīʿah* (Auda,

2008), Maqasid dipandang sebagai sistem nilai dinamis yang diinternalisasi oleh pengusaha melalui filter ekosistem organisasi.

Hipotesis 4 (H2): Diduga, terdapat pengaruh positif dan signifikan dari Ekosistem Kewirausahaan Sosial (Y1) terhadap internalisasi nilai-nilai Maqāṣid al-Sharīʿah (M) bagi para pengusaha HIPMI.

4. Muara Kontribusi terhadap Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Tujuan akhir dari model penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa sinergi material dan spiritual mampu menggerakkan kontribusi nyata terhadap agenda global 2030. Ekosistem kewirausahaan sosial merupakan sistem yang mencakup dukungan inkubasi, akses modal, mentoring, jaringan, dan lingkungan usaha yang kondusif. Menurut konsep *Entrepreneurial Ecosystem* yang dikembangkan oleh Daniel Isenberg, keberhasilan kewirausahaan tidak hanya ditentukan oleh individu, tetapi juga oleh ekosistem yang mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.

Dalam konteks penelitian ini, ekosistem kewirausahaan sosial diproyeksikan berkontribusi terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan kemitraan pembangunan. Semakin kuat ekosistem kewirausahaan sosial yang terbentuk, maka semakin besar kontribusinya terhadap pencapaian SDGs.

Hipotesis 5 (H3): Diduga, terdapat pengaruh positif dan signifikan dari Ekosistem Kewirausahaan Sosial (Y1) terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Y2).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Maqasid tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi sebagai sistem nilai yang dapat diintegrasikan dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Dalam penelitian ini, maqasid syariah berfungsi sebagai system filter nilai dan etika yang mengarahkan aktivitas kewirausahaan agar tidak hanya berorientasi keuntungan ekonomi, tetapi juga kebermanfaatan sosial dan keberlanjutan. Dengan demikian, internalisasi maqasid syariah diperkirakan mampu meningkatkan kontribusi kewirausahaan sosial terhadap pencapaian SDGs.

Hipotesis 6 (H4): Diduga, terdapat pengaruh positif dan signifikan dari Maqāṣid al-Sharīʿah (M) terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Y2).

5. Peran Mediasi Ganda (*Dual Mediation Mechanism*)

Dalam model penelitian ini, maqasid syariah tidak hanya diposisikan sebagai variabel independen, tetapi juga sebagai variabel moderasi berbasis nilai. Artinya, nilai-nilai maqasid syariah memperkuat hubungan antara ekosistem kewirausahaan sosial dan pencapaian SDGs. Ekosistem kewirausahaan yang didukung nilai keadilan, keberlanjutan, kemaslahatan, dan etika sosial Islam diperkirakan menghasilkan dampak pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, semakin tinggi internalisasi maqasid syariah, maka semakin kuat pengaruh ekosistem kewirausahaan sosial terhadap pencapaian SDGs. Model penelitian ini menguji mekanisme mediasi ganda, di mana ekosistem material (Isenberg) dan filter nilai spiritual (Auda) bekerja secara sinergis untuk mengonversi faktor input menjadi kontribusi SDGs yang berdampak luas.

a. **Hipotesis 7 (H5a)**: Diduga, Ekosistem Kewirausahaan Sosial (Y1) bertindak sebagai variabel mediasi yang menghubungkan faktor input (X1, X2, X3) dengan internalisasi Maqāṣid al-Sharīʿah (M).
b. **Hipotesis 8 (H5b)**: Diduga, Maqāṣid al-Sharīʿah (M) bertindak sebagai variabel mediasi yang menghubungkan Ekosistem Kewirausahaan Sosial (Y1) dengan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Y2).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN